



**IMPLIKASI AMANDEMEN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
MENAKERTRANS INDONESIA DAN *INTERNATIONAL MANPOWER  
DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAPAN (IMM)* TERHADAP  
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

***THE IMPLICATIONS OF THE AMENDMENT COOPERATION  
AGREEMENT BETWEEN MENAKERTRANS INDONESIA AND  
INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT ORGANIZATION OF  
JAPAN (IMM) ON EMPLOYMENT IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Oleh

**ANTONIUS Satriya Wibowo**

**NIM 100910101065**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**IMPLIKASI AMANDEMEN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
MENAKERTRANS INDONESIA DAN *INTERNATIONAL MANPOWER  
DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAPAN (IMM)* TERHADAP  
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

***THE IMPLICATIONS OF THE AMENDMENT COOPERATION  
AGREEMENT BETWEEN MENAKERTRANS INDONESIA AND  
INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT ORGANIZATION OF  
JAPAN (IMM) ON EMPLOYMENT IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Studi Progam Ilmu Hubungan Internasional (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**ANTONIUS Satriya Wibowo**

**NIM 100910101065**

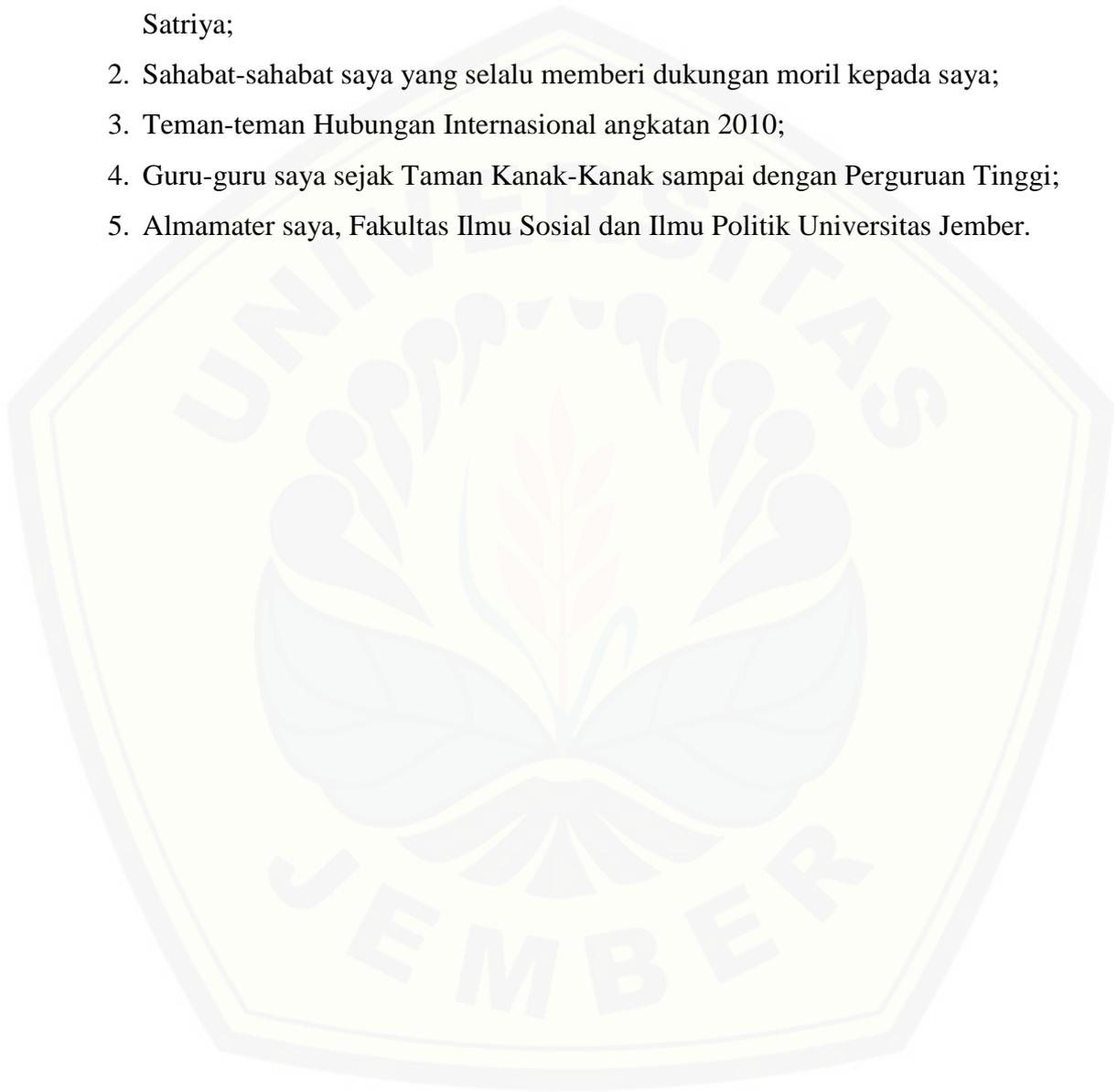
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Hollivayani dan Ayahanda Hari Prasetyo Utomo, istri Ifah Lutfi, adik Anita Lestari, dan anak saya Ananda Reyza Putra Satriya;
2. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberi dukungan moril kepada saya;
3. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2010;
4. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
5. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



**MOTTO**

*“Jangan menyerah atas impianmu. Impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah,  
bahwa sukses bukan kunci utama kebahagiaan. Semangat!”*

Mario Teguh<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kumpulan Kata Kata Bijak Motivasi Mario. Diakses Dari <http://www.carakita07.com/2015/09/kumpulan-kata-kata-bijak-motivasi-mario.html>, pada tanggal 20 Juli 2017

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Antonius Satriya Wibowo

NIM : 100910101065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: *Implikasi Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara Menakertrans Indonesia dan International Manpower Development Organization of Japan (IMM) Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia* adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2017

Yang menyatakan,

Antonius Satriya Wibowo

NIM 100910101065

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI AMANDEMEN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
MENAKERTRANS INDONESIA DAN *INTERNATIONAL MANPOWER  
DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAPAN (IMM)* TERHADAP  
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

***THE IMPLICATIONS OF THE AMENDMENT COOPERATION  
AGREEMENT BETWEEN MENAKERTRANS INDONESIA AND  
INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT ORGANIZATION OF  
JAPAN (IMM) ON EMPLOYMENT IN INDONESIA***

Oleh

**Antonius Satriya Wibowo**

**NIM 100910101065**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supriyadi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Implikasi Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara Menakertrans Indonesia dan International Manpower Development Organization of Japan (IMM) Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia” telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2017

Pukul : 12.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :  
Ketua

Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum  
NIP 195904231987021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Supriyadi, M.Si  
NIP 195803171985031003

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si  
NIP 196105151988021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP 195908311989021001

Dra. Sri Yuniati, M.Si  
NIP 196305261989022001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

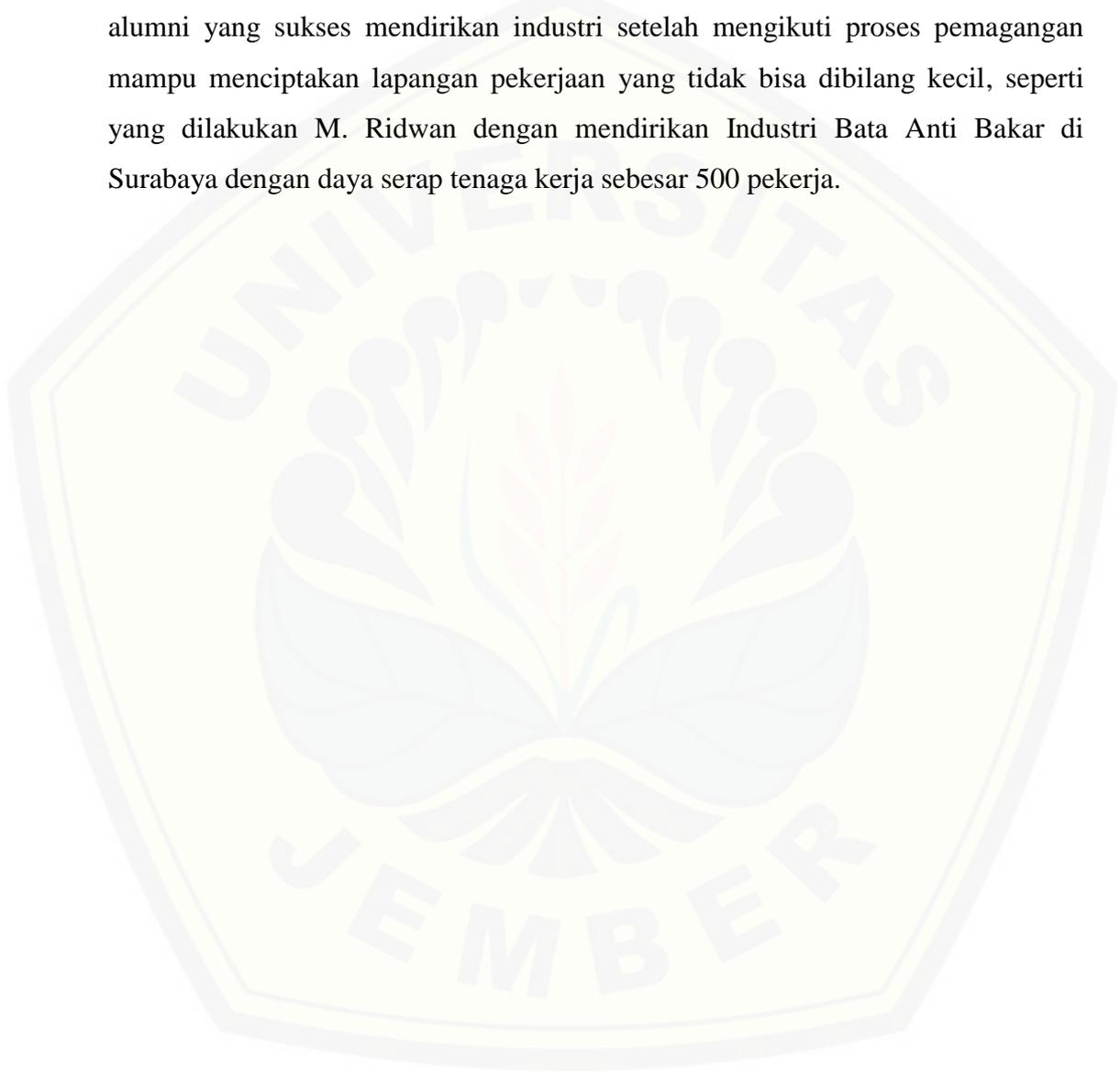
**Implikasi Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara Menakertrans Indonesia dan International Manpower Development Organization of Japan (IMM) Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia;** Antonius Satriya Wibowo; 2010; 78 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini membahas tentang implikasi dari amandemen perjanjian kerjasama antara Kemenakertrans Indonesia dan International Manpower Development Organization of Japan (IMM) terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia menjadikan pasar tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif. Hadirnya kerjasama antara Kemenakertrans dan IMM Jepang dalam kerjasama ketenagakerjaan menjadi sangat strategis untuk di teliti lebih lanjut. Apa implikasi dari perjanjian kerjasama ketenagakerjaan kedua negara dapat mengatasi masalah utama ketenagakerjaan di Indonesia yaitu sedikitnya lapangan kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia?

Pertanyaan penelitian tersebut diteliti menggunakan metode Deskriptif – Kualitatif. Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya berdasarkan data yang satu dan data yang lain berdasarkan teori dan konsep-konsep yang digunakan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam karya ilmiah ini dikarenakan data utama yang ditemukan berupa data sekunder, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional, penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implikasi dari amandemen terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam program pemagangan di Jepang. Di dalam ekonomi politik internasional sifat kerjasama dapat berupa dua asumsi, pertama kerjasama yang pada akhirnya akan berujung pada saling mengalahkan satu sama lain (*negative sum game*) atau saling menguntungkan satu sama lainnya (*positive sum game*).

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa keputusan amandemen menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan antara Jepang dan Indonesia

atau *positive sum game*. Indonesia diuntungkan karena setelah amandemen terjadi kenaikan peserta magang dan tenaga kerja Indonesia mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dari perusahaan Jepang. Efek rembetan dari banyaknya peserta magang setidaknya secara agregat dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di Indonesia berdasarkan data pengangguran sebelum dan sesudah Amandemen yaitu sebelum tahun 2010 dan sesudahnya. Tidak hanya itu, beberapa profil alumni yang sukses mendirikan industri setelah mengikuti proses pemagangan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak bisa dibilang kecil, seperti yang dilakukan M. Ridwan dengan mendirikan Industri Bata Anti Bakar di Surabaya dengan daya serap tenaga kerja sebesar 500 pekerja.



## PRAKATA

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implikasi Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara Menakertrans Indonesia dan International Manpower Development Organization of Japan (IMM) Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam proses penulisan, sehingga diperlukan masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji Utama yang telah memberikan dorongan dan banyak waktunya kepada penulis selama penulis belajar di jurusan ini;
2. Drs. Supriyadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan, dorongan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
6. Seluruh Dosen, staf, dan karyawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah

memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di Jurusan ini;

7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh baik secara moril dan materi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Istri tercinta yang telah sabar dan pengertian menunggu penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman HI 2010;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah menjadi inspirasi dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis selipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 22 Juni 2017

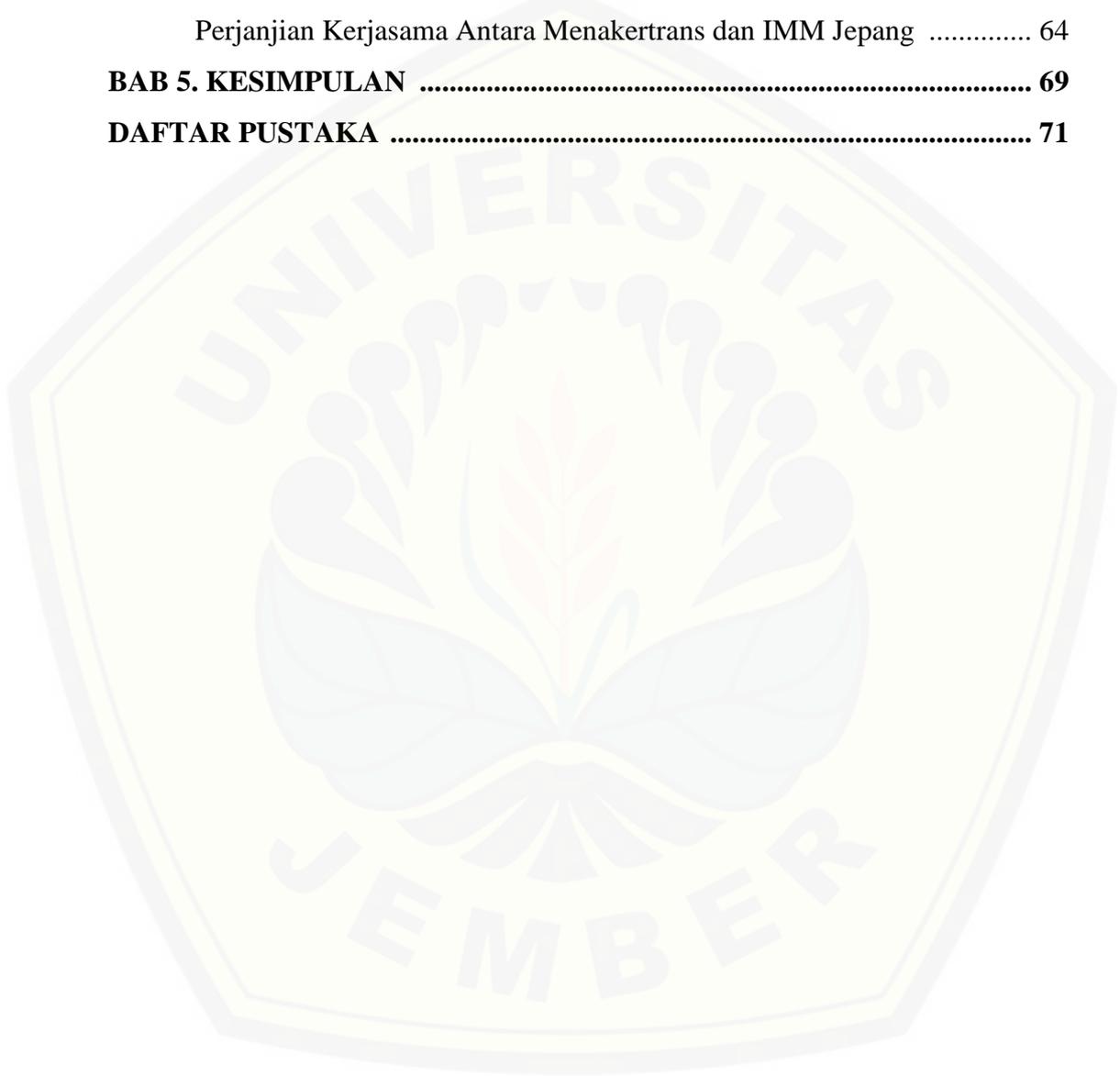
Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	3
1.2.1 Batasan Materi .....	3
1.2.2 Batasan Waktu .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Kerangka Pemikiran .....	6
1.7 Argumen Utama .....	9
1.8 Metode Penelitian .....	9
1.7.1 Metode Pengumpulan Data .....	10
1.7.2 Metode Analisis Data .....	10
1.9 Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB 2. KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG .....</b>	<b>13</b>
2.1 Sejarah Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang .....	13
2.2 Kerjasama Ekonomi Jepang – Indonesia .....	15
2.2.1 Kerjasama Bidang Perdagangan dan Investasi .....	15
2.2.2 Kerjasama Bidang Lingkungan .....	20
2.2.3 Kerjasama Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan .....	22
2.2.4 Bantuan Luar Negeri (ODA) Indonesia – Jepang .....	24
2.2.5 Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan .....	28
2.3 Regulasi Progam Pemagangan Luar Negeri Antara Kemenakertrans dengan IMM Jepang .....	29
<b>BAB 3. KEBIJAKAN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN ANTARA KEMENAKERTRANS INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAPAN (IMM).....</b>	<b>32</b>
3.1 Sistem Ketenagakerjaan Indonesia – Jepang .....	32
3.1.1 Sistem Ketenagakerjaan Indonesia .....	32
3.1.2 Pasar Tenaga Kerja Indonesia .....	33
3.1.3 Sistem Ketenagakerjaan Jepang .....	42
3.1.4 Pasar Tenaga Kerja Jepang .....	45
3.2 Kerjasama Ketenagakerjaan Indonesia Jepang .....	49
3.2.1 Kerjasama Ketenagakerjaan Melalui Perjanjian (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA .....	50
3.2.2 Kerjasama Ketenagakerjaan Antara Kemenakertrans R.I dengan <i>The Association For International Manpower Development Of Medium And Small Enterprises Japan</i> (IMM) .....	53
<b>BAB 4. ANALISIS DAMPAK AMANDEMEN PERJANJIAN KERJASAMA IMM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA .....</b>	<b>58</b>
4.1 Meningkatnya Jumlah Sumber Daya yang Mengikuti Progam	

Pemagangan Hasil dari Kerjasama Antara Menakertrans Indonesia dan IMM Jepang .....	58
4.2 Terciptanya Lapangan Pekerjaan yang Mampu Didirikan Oleh Alumni Progam Pemagangan Hasil dari Kerjasama Menakertrans Indonesia dengan IMM Jepang .....	61
4.3 Keuntungan bagi Indonesia dan Jepang dengan Diamandemennya Perjanjian Kerjasama Antara Menakertrans dan IMM Jepang .....	64
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

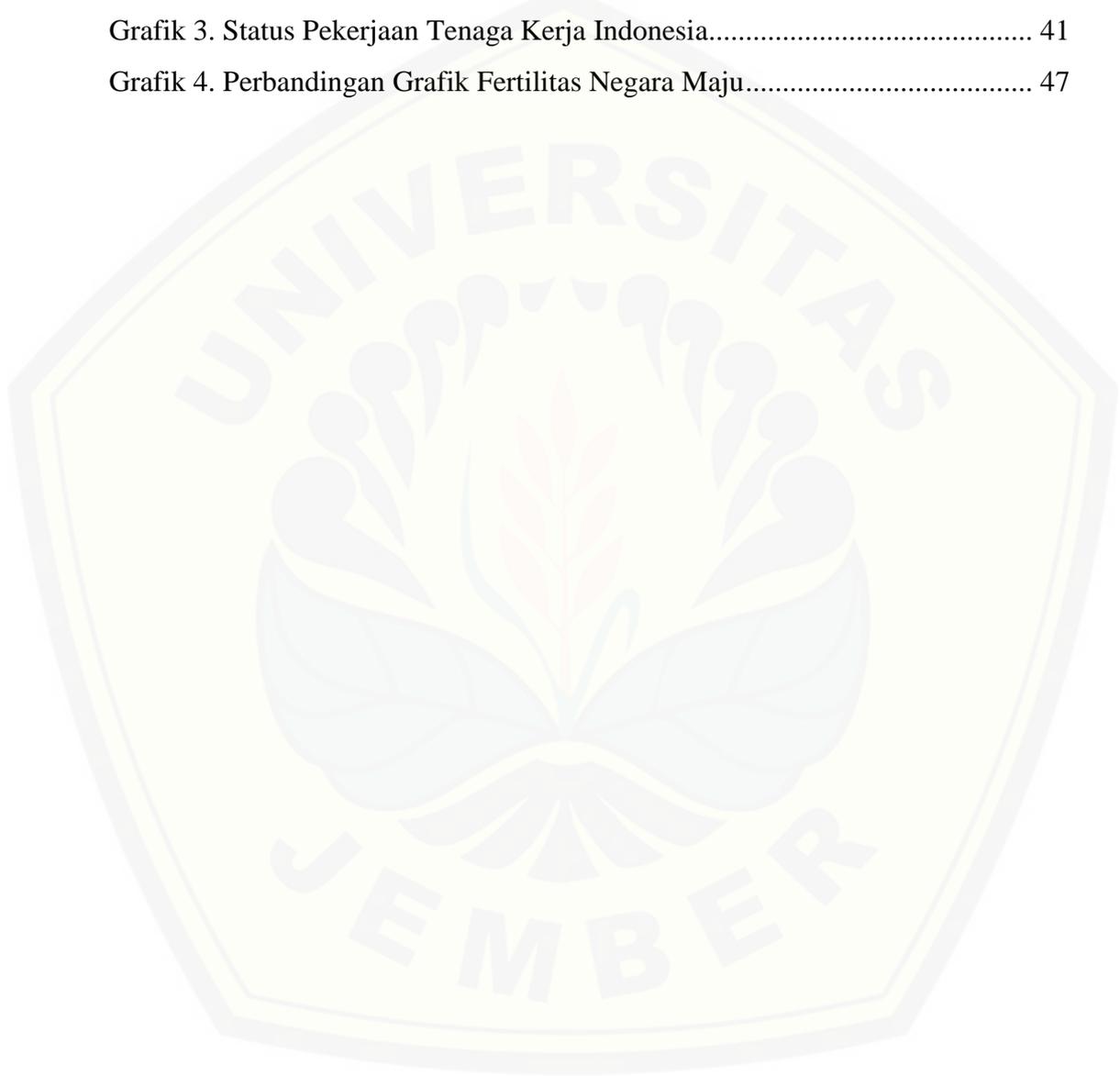


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Utama Tahun 2016 .....	17
Tabel 2. Daftar 10 Negara Asal Investasi Asing Terbesar ke Indonesia pada Triwulan I 2017.....	18
Tabel 3. Nilai Investasi Jepang ke Indonesia 2011-2016.....	19
Tabel 4. Pinjaman Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Negara (Oktober 2016).....	27
Tabel 5. Upah Minimum Indonesia (Perbulan dalam Juta) .....	33
Tabel 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan .....	39
Tabel 7. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Asia Tenggara.....	40
Tabel 8. Upah Minimum Jepang (Perjam).....	43
Tabel 9. Demografi Jepang .....	48
Tabel 10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Program G to G Jepang .....	52
Tabel 11. Proporsi Program Magang dalam Satu Perusahaan .....	56
Tabel 12. Tingkat Pengangguran 1999 – 2016 .....	60

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Perbandingan Bantuan ODA Jepang di Indonesia terhadap Bantuan Pemerintah Asing dan LSM Asing.....	25
Grafik 2. Perincian Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Bidang (Total) (2003 s/d 2005).....	26
Grafik 3. Status Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia.....	41
Grafik 4. Perbandingan Grafik Fertilitas Negara Maju.....	47



**DAFTAR SINGKATAN**

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
APEC	: <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i>
ASEM	: <i>Asia Eropa Meeting</i>
B to B	: <i>Business to Business</i>
EPA	: <i>Economic Partnership Agreement</i>
ESCAP	: <i>Economic and Social Commission for Asia and the Pasific</i>
GIIC	: <i>Greenland International Industrial Center</i>
G to G	: <i>Government to Government</i>
HIDA	: <i>Human Resources and Industry Development Association</i>
IJEPA	: <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
IMM	: <i>International Manpower Development Organization of Japan</i>
JAPINDA	: <i>Japan-Indonesia Association</i>
JBIC	: <i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
JICWELS	: <i>Japan International Corporation of Welfare Service</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MRT	: <i>Mass Rapid Transportation</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
TIA	: <i>Toyota Indonesia Academy</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peningkatan kinerja ekonomi Indonesia dalam dekade belakangan ini banyak dipuji oleh banyak pihak. Kemajuan ekonomi Indonesia relatif stabil dan positif ditengah pelambatan ekonomi global. Akan tetapi masalah serius dari pertumbuhan ekonomi adalah masih tingginya tingkat kemiskinan. Meski terjadi penurunan secara agregatif pada maret 2016 menjadi 28,01 juta penduduk atau menurun sekitar 0,50 juta orang dibanding pada tahun 2015 angka yang masih menyentuh dua digit dapat dibaca masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup> Dua permasalahan serius dalam penanggulangan kemiskinan adalah sedikitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas pekerja Indonesia.

Menurut catatan LIPI dibanding dengan kualitas pekerja di ASEAN sangat jauh tertinggal. Produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya 10,3 persen dari produktivitas Singapura. Jauh di bawah tingkat produktivitas tenaga kerja Malaysia sebanyak 36,2 persen, serta Thailand 16,7 persen.<sup>3</sup> Rendahnya kualitas pekerja Indonesia berbanding lurus dengan masih tingginya pengangguran.

Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu : pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 93,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang pengangguran terbuka (*open unemployment*). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 11 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja

---

<sup>2</sup> Irwan Supriyatnya. Darmin : Kemiskinan Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Berkualitas. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/10/144759126/darmin.kemiskinan.menurun.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.lebih.berkualitas>

<sup>3</sup> Lit Septyaningsih. Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Masih Rendah. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/17/nutmxw377-kualitas-tenaga-kerja-indonesia-masih-rendah>

Indonesia yang masih mendominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %.<sup>4</sup> Kedua masalah inilah menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas secara nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para tenaga kerja Indonesia mencari peruntungan keluar negeri.

Membuka lapangan kerja dan memperbaiki kualitas pekerja merupakan pekerjaan rumah pemerintah dalam reformasi ekonomi. Menyelesaikan dua pekerjaan tersebut pemerintah melakukan kerjasama ekonomi dan ketenagakerjaan dengan Jepang yang salah satunya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menandatangani EPA (*Economic Partnership Agreement*), dan Implikasi penempatan dimulai sejak 19 Mei 2008, yaitu setelah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat dan Managing Director *The Japan International Corporation of Welfare Services* (JICWELS) Takashi Tsunoda menandatangani nota kesepahaman di Jakarta dan juga amandemen MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan *The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan* (IMM) pada tanggal 6 September 2008.

Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang ketenagakerjaan terus menguat ditandai dengan upaya peningkatan keterampilan TKI yang dikirim ke Jepang melalui proses pengembangan tenaga terampil yang dikelola *Intenational Manpower Development Organization* (IMM) yang dibentuk oleh asosiasi perusahaan menengah dan kecil di Jepang.

IMM Jepang bekerjasama dengan Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Depnakertrans) Indonesia dalam merekrut tenaga kerja indoneisa dengan membentuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut dimulai setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 16 September 1994 oleh IMM dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia (Kemenakertrans) dan diperbarui melalui amandemen terhadap MoU tersebut

---

<sup>4</sup> Didin S. Damanhuri. 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI. Hlm. 76

pada tanggal 1 Februari 2010<sup>5</sup>. Salah satu hasil kerjasama MoU antara Kemenakertrans dengan IMM Jepang adalah dibukanya program pemagangan (praktek kerja) ke Jepang.

Menurut data Kemenakertrans, sejak tahun 1994 yaitu dimulainya kerjasama antara IMM dan Kemenakertrans sampai dengan Desember 2009 yaitu sebelum dilakukanya amandemen MoU antara IMM dengan Kemenakertrans pada 1 Februari 2010 sudah memberangkatkan sebanyak 29.587 TKI yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia ke Jepang dan yang masih menjalankan program pemagangan di Jepang berjumlah 5.668 orang<sup>6</sup>.

Dengan jumlah TKI yang relatif banyak mengikuti program pemagangan hasil dari MoU antara IMM dengan Kemenakertrans, maka menarik untuk di teliti apa implikasi dari adanya amandemen perjanjian kerjasama *International Manpower Development Organization Japan (IMM)* terhadap tenaga kerja di Indonesia yang dilakukan pada 1 Februari 2010.

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam melakukan analisa pada studi Hubungan Internasional, diperlukan adanya suatu pembatasan ruang lingkup yang jelas. Hal ini bertujuan untuk membatasi masalah agar pembahasan tidak berkembang luas dan keluar dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

### 1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau obyek yang akan dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau obyek studinya. Batasan materi dalam penelitian ini adalah implikasi perjanjian setelah adanya amandemen *Memorandum of Understanding (MOU)* antara

---

<sup>5</sup> PT.Gapura K. Mandiri. 2010. *Amandemen MoU Progam Pemagangan ke Jepang Disahkan*. Diakses dari <http://gakama.co.id/index.php/public/information/news-detail/23>, pada 18 April 2017

<sup>6</sup> Kompas.com. 2010. *Amandemen MoU Progam Pemagangan ke Jepang Disahkan*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/01/12115352/Amandemen.MoU.Program.Pemagangan.ke.Jepang.Disahkan>, pada tanggal 17 April 2017

Kemennakertrans R.I dengan *The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan* (IMM) terhadap ketenagakerjaan dan kepentingan nasional Indonesia.

### 1.2.2 Batasan Waktu

Penelitian ini menggunakan batasan waktu mulai tahun 2010 sampai 2016. Alasan penulis memulai penelitian dari tahun 2010 karena pada 1 Februari 2010 merupakan waktu amandemen *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Kemennakertrans R.I dengan *The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan* (IMM) terhadap tenaga kerja di Indonesia dilakukan, sedangkan penelitian dibatasi sampai dengan 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 merupakan tahun yang menjadi peningkatan kerjasama antara Industri Kecil Menengah (IKM) Jepang dengan Industri di Indonesia dengan peningkatan kerjasama sebesar 520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Oleh karena itu, dengan mengambil waktu amandemen MoU antara Kemenakertrans dengan IMM pada 1 Februari 2010 sampai dengan peningkatan kerjasama IKM Jepang dengan Industri Nasional pada 2016, penelitian ini dapat untuk mengetahui apa saja implikasi yang terjadi setelah adanya amandemen terhadap MoU antara Kemenakertrans dengan IMM. Penulis juga akan mencantumkan data diluar batasan waktu untuk memperkuat analisis penelitian.

### 1.3 Rumusan Masalah

Semenjak di berlakukannya kerjasama antara Kemenakertrans dengan IMM pada tahun 1994 setidaknya sudah terjalin kerjasama yang cukup erat dimana tenaga kerja asal Indonesia sudah berangkat dan bekerja di Jepang. Menurut data Kemenakertrans setidaknya dalam kurun waktu 1994 sampai dengan 2010 sudah mencapai 29.587 TKI yang diberangkatkan di Jepang. Tidak hanya itu sebelum proses pemberangkatan juga diselenggarakan peningkatan keterampilan bagi TKI yang berangkat ke Jepang oleh IMM. Secara garis besar

kerjasama ketenagakerjaan antara Kemenakertrans dengan IMM memberi dampak yang baik bagi Indonesia, akan tetapi pada 2010 pemerintah Indonesia melalui Kemenakertrans dan IMM sepakat untuk mengamandemen MoU. Dari penjelasan singkat tersebut maka, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah **“Apa Implikasi dari Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara Menakertrans Indonesia dan *International Manpower Development Organization Of Japan(IMM)* Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia?”**

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah senantiasa diupayakan ke arah terwujudnya tujuan yang diinginkan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui implikasi kebijakan amandemen perjanjian kerjasama *International Manpower Development Organization of Japan (IMM)* dengan *Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans)* Indonesia terhadap ketenagakerjaan Indonesia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini dapat dan mampu memberikan masukan-masukan kepada semua pihak, yakni :

1. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari ide - ide atau gagasan-gagasan yang dituangkan untuk diaplikasikan bagi bangsa dan negara serta kemampuan menulis melalui karya ilmiah.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memperkaya penelitian terhadap implikasi terhadap kerjasama internasional terutama bidang ketenagakerjaan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan terutama Kementerian Ketenagakerjaan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Agar dapat menjelaskan fenomena dan menjawab permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa konsep yaitu Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi Politik Internasional digunakan untuk menjelaskan keputusan Indonesia dalam hal ini Kemenakertrans Indonesia melakukan kerjasama dan kesepakatan terkait ketenagakerjaan dengan pemerintah Jepang melalui *International Manpower Development Organization of Japan (IMM)*.

### Ekonomi Politik Internasional

Kajian Ekonomi Politik Internasional dalam kajian Hubungan Internasional (HI) modern mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan perubahan dalam hubungan internasional itu sendiri. Dalam kajian ekonomi politik internasional antara kepentingan ekonomi dan politik memiliki keterikatan dengan politik serta saling mempengaruhi.

Kerjasama antar negara dalam hubungan internasional yang meningkat mengakibatkan isu tradisional dalam HI bergeser dari isu terkait perang dan perdamaian menjadi isu tentang kerjasama antar negara. Dimulai dengan revolusi teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, dunia mengalami apa yang disebut sebagai globalisasi. Dunia semakin terkoneksi satu sama lain tanpa sekat dan batas negara. Meningkatnya kerjasama juga mengakibatkan negara saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain melalui meningkatnya kerjasama baik bilateral maupun multilateral sudah semakin kompleks.

Robert Keohane dan Joseph S. Nye dalam *Power and Interdependence: World Politics in Transition* mengatakan bahwa interdependensi yang kompleks diartikan sebagai “*Dependence means a state of being determined or significantly affected by external forces. Interdependence, most simply defined, means mutual dependence. Interdependence in world politics refers to situations characterized by reciprocal effects among countries or among actors in different countries.*”<sup>7</sup> Sedangkan dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI) kerjasama antara aktor

---

<sup>7</sup> Robert O. Keohane and Joseph S. Nye. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston. Little, Brown & Co. Hlm. 8

internasional menjadi fokus dari kajian atau sebagai subjek permasalahan yang fokus utamanya adalah hubungan (interrelationship) antara kekuasaan publik dan pribadi dalam persoalan pengalokasian sumberdaya yang terbatas atau langka.<sup>8</sup>

Dalam EPI sifat kerjasama dapat berupa dua asumsi, pertama kerjasama pada akhirnya akan berujung pada saling mengalahkan satu sama lain (*negative sum game*) atau saling menguntungkan satu sama lainnya (*positive sum game*). *Negative sum game* adalah sebuah kondisi dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah negatif. Artinya, jumlah nilai dari seluruh peserta pada akhir proses lebih rendah daripada pada awal proses sedangkan *Positive sum game* adalah kondisi dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta yang terlibat adalah positif. Artinya jika jumlah nilai atau manfaat dari seluruh peserta pada akhir proses lebih besar daripada pada awal proses. Walaupun aktivitas *positive sum game* tidak menjamin seluruh peserta akan mendapatkan keuntungan, *positive sum game* menghasilkan manfaat bagi seluruh peserta secara kolektif.

Robert Powell dalam *Absolute and Relative Gains in International Relations Theory* menyebutkan *positive sum game* dalam pendekatan neoliberal institusional akan tercipta dalam situasi kerjasama. Kerjasama akan menghasilkan kondisi yang seimbang (equilibrium).<sup>9</sup> Robert Powell juga mengatakan bahwa baik *negative sum game* maupun *positive sum game* berangkat dari pendekatan yang berbeda dalam kajian hubungan internasional. *Negative sum game* berasal dari pendekatan realisme sedangkan *positive sum game* dari Neoliberal.

Secara garis besar ekonomi politik internasional merupakan dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi), yang terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Ada empat faktor politik yang mempengaruhi ekonomi yaitu<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> John Ravenhill. 2008. *Global Political Economy. Fifth Edition Oxford Press*. Hlm. 21

<sup>9</sup> Robert Powell. 1991. *Absolute and Relative Gains in International Relations Theory. The American Political Science Review*, Vol. 85, No. 4, pp. 1303-1320. American Political Science Association.

<sup>10</sup> Anak Agung Banyu Perwita. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 76

- 1) Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
- 2) Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
- 3) Kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik
- 4) Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik dalam proses dimana negara-negara dan aktor non negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai tujuan.

Dalam studi terkait keputusan kerjasama antara ketenagakerjaan antara *International Manpower Development Organization of Japan (IMM)* dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Indonesia dengan poin peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia melalui pemagangan menekankan pada sifat positive sum game dimana pemerintah Indonesia mendapatkan kuota untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Jepang serta akan mendapatkan remitansi berupa devisa, sedangkan dalam posisi tenaga kerja tidak hanya mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik tetapi juga mendapatkan transfer ilmu dan keterampilan (*transfer of knowledge*) sehingga dapat meningkatkan status pekerja dari pekerja tidak terampil (*unskilled labour*) menjadi pekerja terampil (*skill labour*).

Aspek ekonomi politik internasional dalam kajian ini terletak pada kepentingan Jepang untuk Indonesia. Dengan membuka kesempatan kerja bagi TKI untuk bekerja di Jepang setidaknya juga akan meningkatkan derajat kerjasama yang mengakibatkan satu sama lain yaitu antara Jepang dan Indonesia mengalami saling ketergantungan yang kompleks. Jepang berkepentingan untuk melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Interdependensi antara Jepang dan Indonesia terlihat dari meningkatnya nilai investasi Jepang ke Indonesia sebesar 1,590 miliar menempatkan Jepang sebagai negara terbesar kedua yang berinvestasi di Indonesia. Sekitar kurang lebih 1000 perusahaan Jepang diperkirakan menyerap lebih dari 32 ribu pekerja dari Indonesia. Serta kerjasama dalam bentuk pinjaman baik berupa Hutang, Hibah

maupun kerjasama Teknik.<sup>11</sup> Saling ketergantungan antara Jepang dan Indonesia menjadi argumen kenapa Indonesia menandatangani MoU ketenagakerjaan pada 1994 dan bersepakat melakukan amandemen pada tahun 2010.

### 1.7 Argumen Utama

Dalam kasus amandemen kerjasama dan kesepakatan terkait ketenagakerjaan dengan pemerintah Jepang melalui *International Manpower Development Organization of Japan (IMM)* berpengaruh terhadap peningkatan kerjasama antara Jepang dengan Indonesia terutama pada sektor ketenagakerjaan dan industri kecil menengah. **Implikasi adanya amandemen kesepakatan ketenagakerjaan dengan pemerintah Jepang membuat menurunnya jumlah angka pengangguran di Indonesia serta adanya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia hasil dari program pemagangan.** Hal ini mengacu pada data peningkatan kerjasama kedua negara yang tercermin dari adanya peningkatan kerjasama antara Jepang dan Indonesia disektor industri kecil menengah yang menjadi basis kerjasama IMM Jepang dengan Indonesia serta adanya transfer ilmu pengetahuan didalamnya guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keterampilan Tenaga Kerja Indonesia.

### 1.8 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang akan digunakan untuk membantu menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Dalam hal ini metode penelitian yang dipakai dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Menurut Soetrisno Hadi ;

“Metode penelitian memberikan garis-garis yang sangat cermat dan menganjurkan syarat-syarat yang sangat keras, maksudnya adalah untuk mencegah agar pengetahuan yang dicapai suatu *research* dapat mencapai karya ilmiah yang setinggi-tingginya.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Perindustrian. *Jepang Investor Nomor Satu*. Diakses dari <http://kemenperin.go.id/artikel/6113/jepang-Investor-Nomor-Satu> , pada 16 April 2017

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Andi Offset. Hlm. 4

### 1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Data-data yang digunakan penulis berasal dari literatur baik yang berbentuk buku, jurnal, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data-data tersebut merupakan hasil kepastakaan yang diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang baca FISIP Universitas Jember
3. Koleksi pribadi
4. Situs-situs internet

### 1.8.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini ditujukan agar mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dan objektif. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode Deskriptif – Kualitatif. Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya berdasarkan data yang satu dan data yang lain berdasarkan teori dan konsep-konsep yang digunakan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam karya ilmiah ini dikarenakan data utama yang ditemukan berupa data sekunder, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

Menurut Soegiono, metode penelitian kualitatif seharusnya, menyertakan data pada setiap masalah yang diangkat.<sup>13</sup>

“Misalnya ada masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah, maka perlu ditunjukkan data kualitas SDM tersebut, melalui Human Development Index misalnya. Masalah kemiskinan perlu ditunjukkan data tentang jumlah penduduk yang miskin, masalah korupsi perlu ditunjukkan jumlah koruptor, dsb.”

Data-data dari masalah dapat berupa hasil dari dokumentasi penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pernyataan orang-orang

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. cv Alfabeta. Hlm. 206

yang patut dipercaya.<sup>14</sup> Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian akan dianalisis sehingga diketahui hubungan yang signifikan pada variabel tersebut dan memperjelas objek yang diteliti dengan adanya penelitian.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 bab. Sebagaimana uraian diatas, maka:

#### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan yang meliputi batasan materi dan batasan waktu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis atau argumen utama, metode penelitian yang mencakup metode pengumpulan data dan metode analisis data, dan yang terakhir sistematika penulisan.

#### **Bab II Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Jepang**

Bab ini berisi tentang kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Pada bab ini akan menjelaskan gambaran tentang perjalanan panjang kerjasama Indonesia dengan Jepang terutama dari aspek ekonomi politik internasional baik itu penjelasan data agregat pertahun (*year on year*) maupun penjelesan tentang kerjasama sektor industri menengah kecil Jepang dengan Industri Indonesia.

#### **Bab III Kerjasama Jepang –Indonesia dalam Ketenagakerjaan**

Bab ini berisi hubungan kerjasama Jepang –Indonesia dalam tenaga kerja, proses pembentukan perjanjian internasional dalam ketenagakerjaan terutama membahas tentang kerjasama IMM dengan Kemenakertrans. Dalam bab ini juga akan diuraikan faktor apa yang melatarbelakangi ditandatanganinya MoU antara IMM dengan Kemenakertrans pertama kali pada 1994 serta bagaimana implikasi yang

---

<sup>14</sup> *ibid*

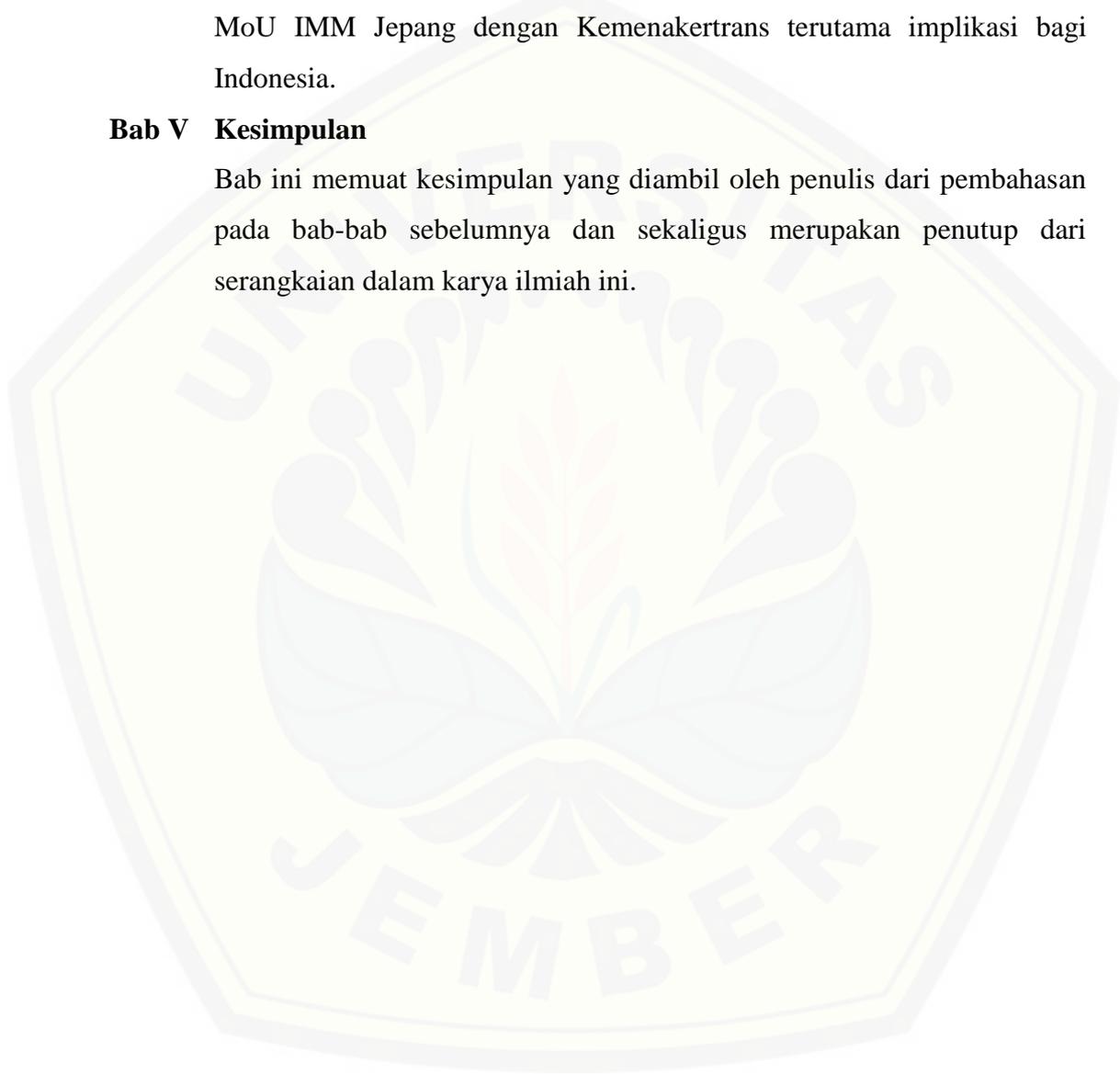
ditimbulkan dengan adanya MoU sebelum diamandemen pada 1 Februari 2010.

#### **Bab IV Analisis Dampak Amandemen Perjanjian Kerjasama IMM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia**

Bab ini berisi tentang pembentukan kerjasama IMM dan dampak perjanjian IMM terhadap tenaga kerja Indonesia. Apa saja implikasi dari MoU IMM Jepang dengan Kemenakertrans terutama implikasi bagi Indonesia.

#### **Bab V Kesimpulan**

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup dari serangkaian dalam karya ilmiah ini.



## BAB 2. KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG

### 2.1 Sejarah Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang.

Sejak Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia pada bulan April 1958, hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berjalan selama 59 tahun, kedua negara menunjukkan perbaikan hubungan bilateral disemua aspek baik ekonomi, politik dan sosial budaya. Diawali pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963, kini hubungan kedua negara masih cukup erat ditandai dengan kunjungan perdana menteri Jepang Shinzo Abe pada 15 Januari 2017. Setidaknya dalam waktu dua tahun pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan pertemuan sebanyak enam kali dengan Perdana Menteri Shinzo Abe.<sup>15</sup> Hal ini menandakan bahwa hubungan kedua negara sangat strategis dan saling menguntungkan.

Sejarah hubungan bilateral kedua negara sangat panjang. Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menandai sejarah hubungan erat dengan beberapa peristiwa kerjasama yang dilakukan kedua negara semenjak 59 tahun yang lalu yang terlihat pada persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintah, dan menjadi landasan yang lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang. Dimulai dari penandatanganan *Treaty of amity and commerce* oleh Menteri Luar Negeri Jepang Zentaro Kosaka dan Menteri Luar Negeri Indonesia Dr Subandrio pada 1 Juli 1961 di Tokyo dan diratifikasi pada Februari 1963. Perjanjian *Treaty of amity and commerce* mengatur tentang kerjasama ekonomi terutama terkait hambatan perdagangan kedua negara.<sup>16</sup> Setelah perjanjian tentang perdagangan ditandatangani pada 1961, selang setahun kedua

---

<sup>15</sup> Pertemuan Dengan Shinzo Abe Di Istana Bogor, Indonesia Dan Jepang Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Yang Sangat Produktif. Dalam <http://ksp.go.id/pertemuan-dengan-shinzo-abe-di-istana-bogor-indonesia-dan-jepang-hasilkan-sejumlah-kesepakatan-yang-sangat-produktif/>

<sup>16</sup> Treaty Of Amity And Commerce Between Japan And The Republic Of Indonesia And Exchange Of Notes. *American Society Of International Law. International Legal Materials*. Vol. 2, No. 4 (July 1963), Pp. 706-726. Diakses pada [https://www.jstor.org/stable/20689659?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/20689659?seq=1#page_scan_tab_contents)

negara melakukan perjanjian hubungan udara pada 23 Januari 1962 di Tokyo. Selain kedua kerjasama tersebut, pada media tahun 80-an juga dilakukan penandatanganan kerjasama strategis antara kedua belah pihak diantaranya kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1981 di Jakarta dan perjanjian penghindaran pajak berganda pada tanggal 3 Maret 1982 di Tokyo. Dan berlanjut pada perjanjian-perjanjian strategis lainya baik secara bilateral maupun multilateral.

Peningkatan kerjasama menuju taraf yang strategis terus berlangsung dan puncaknya ketika disepakatinya kerjasama strategis (*strategic partnership*) yang tertuang dalam kesepakatan “*the Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future*” pada tahun 2006 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007.<sup>17</sup> Indonesia dan Jepang sendiri telah menandatangani IJEPA pada tanggal 20 Agustus 2007 dan telah diratifikasi melalui Perpres nomor 36 tahun 2008. Kerjasama ini mencakup 137 subsektor pada 12 sektor di pihak Jepang, sedangkan Indonesia 77 subsektor pada 8 sektor. Terdapat 3 (tiga) pilar pokok dalam persetujuan di dalam EPA yaitu *Pertama*: Kerjasama peningkatan kapasitas industri menjadi tumpuan harapan; *Kedua*: fasilitasi perdagangan dan investasi; *Ketiga*: liberalisasi yang menghapus sebagian besar tarif bea masuk ke kedua negara.<sup>18</sup> Selain kerjasama yang tertuang dalam nota kesepakatan juga di tindaklanjuti dengan Intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara cukup tinggi.

Mengacu pada data dari kedutaan besar Jepang untuk Indonesia sejak 1998 pertemuan baik di level kepala negara sampai ditingkat menteri setiap tahun rata-rata terjadi 2 sampai 3 kali pertemuan baik kunjungan dari Jepang ke Indonesia atau sebaliknya.<sup>19</sup> Dalam kurun waktu mulai tahun 2005 misalnya tercatat kunjungan Presiden RI ke Jepang pada bulan Juni 2005 dan November 2006.

---

<sup>17</sup> Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Dalam <http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx>

<sup>18</sup> Kementerian Perdagangan Indonesia. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Its Effects on Indonesian and Japanese Economy. Tokyo, 30 November 2007. Dalam <https://www.indonesia-investments.com/upload/documents/Indonesia-Japan-Economic-Partnership-Agreement-IJEPA-Indonesia-Investments.pdf>

<sup>19</sup> Kunjungan Para Tamu Negara. Dalam [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html)

Sementara Perdana Menteri Jepang tercatat melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2005 (PM Junichiro Koizumi), 2007 (PM Shinzo Abe), 2009 (Yukio Hatoyama), dan 2011 (Yoshihiko Noda).<sup>20</sup> Intensitas pertemuan yang cukup sering salah satunya karena adanya kesepakatan *1st Politico-Military* dan *4th Military-Military Talk* pada tanggal 1 November 2011 yaitu dialog polkam tingkat Dirjen (dari Kemlu dan Kemhan) pertama, selain itu juga digagasnya pertemuan rutin two-plus-two (political-military talks) tingkat menteri kedua negara.

Selain itu juga baik Jepang maupun Indonesia juga sama-sama menjadi anggota dalam organisasi maupun forum kerjasama regional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM, sedangkan untuk kerjasama regional seperti ASEAN+3 (Jepang, Korea, Cina), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), serta Indonesia juga menjadi anggota dari Asian Development Bank (ADB) yang digagas Jepang.

## **2.2 Kerjasama Ekonomi Jepang – Indonesia**

Kerjasama antara Jepang dan Indonesia yang berlangsung lama semenjak April 1958 terus menunjukkan perbaikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dengan rentang waktu 59 tahun hubungan kedua negara sudah sangat strategis disemua aspek baik itu ekonomi dan sosial budaya. Bahkan pertemuan kedua kepala negara belakangan ini mengalami intensitas pertemuan yang cukup sering setidaknya sudah 6 kali pertemuan baik itu pertemuan bilateral maupun dalam forum multilateral.

### **2.2.1 Kerjasama Bidang Perdagangan dan Investasi**

Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang sangat strategis meski mengalami pasang surut apabila dilihat dari data agregat kedua negara. Pada medio tahun 2007 misalnya perdagangan kedua negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia sebagai negara tujuan ekspor dan impor dengan total nilai perdagangan sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar USD30 milyar dan

---

<sup>20</sup> Ibid

membukukan peningkatan sebesar USD 3 miliar dari tahun 2006 dengan catatan perdagangan sebesar USD 27 milyar.<sup>21</sup> Dengan rincian Ekspor Indonesia tahun 2007 ke Jepang bernilai USD 23.6 milyar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah USD 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia. Kinerja positif perdagangan internasional Indonesia Jepang terus tercermin pada tahun 2008 dengan nilai perdagangan Indonesia-Jepang senilai USD 32,8 milyar.

Perdagangan Indonesia ke Jepang masih mengandalkan sektor komoditas sebagai komoditi ekspor Indonesia seperti minyak dan gas bumi serta produk non-migas setidaknya ada 50 komoditi non-migas yang memasuki pasar Jepang sedangkan impor Indonesia lebih pada barang padat modal dan industri manufaktur seperti elektronik. Dengan masih besarnya porsi industri komoditas dalam struktur ekonomi Indonesia menyebabkan Indonesia harus terus membuka pasar barang komoditas di luar negeri. Menurut Bank Indonesia, Jepang masih menduduki peringkat ke 3 ekspor barang komoditas Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 9,9 persen dibawah pasar ekspor ke AS sebesar 11,6 persen dan Tiongkok 10 persen.<sup>22</sup>

Kinerja perdagangan antara Indonesia dan Jepang yang tercatat positif pada medio 2007 – 2008 karena memang disebabkan adanya permintaan barang komoditas terutama dari negara-negara industri maju (*advanced industrial country*) atau dikenal dengan *comodity boom*<sup>23</sup> sehingga kinerja perdagangan Indonesia terus tercatat positif sepanjang tahun 2001 sampai dengan berakhirnya *comodity boom* pada 2012. Setelah berakhirnya *comodity boom* kinerja perdagangan kedua negara mengalami penurunan bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan keinginan untuk meninjau ulang Pejanjian Kerjasama

---

<sup>21</sup> Op.cit. Dalam <http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx>

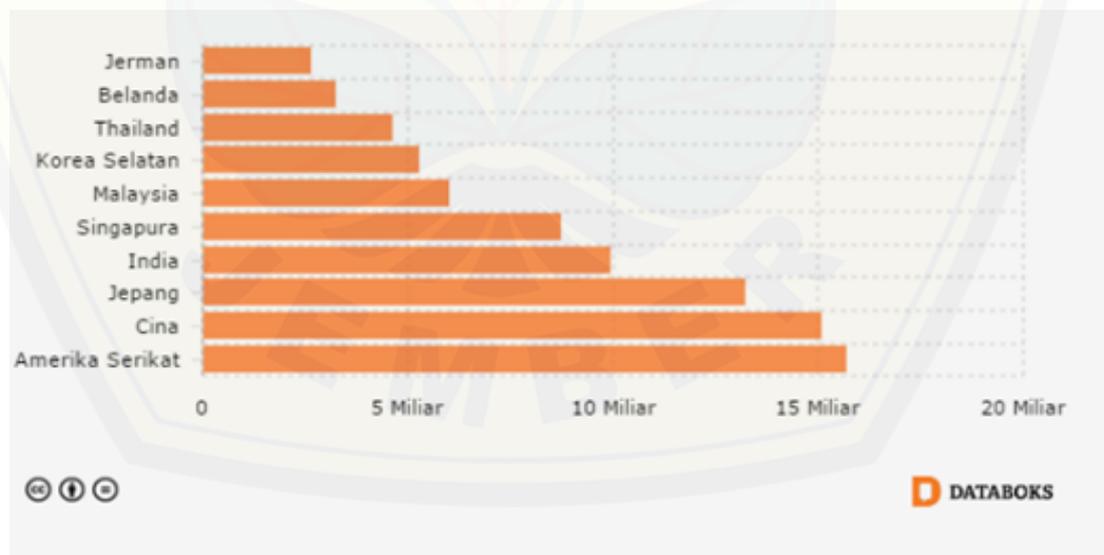
<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Comodity Boom atau meningkatnya permintaan barang komoditas berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan 2012. Gejala ini mengakibatkan Negara dengan struktur perdagangan internasional yang ditopang sektor komoditas mencatatkan kinerja perdagangan internasional yang terus tumbuh tinggi termasuk Indonesia. Dalam Maria Monica Wihardja. The Effect of the Commodity Boom on Indonesia's Macroeconomic Fundamentals and Industrial Development. Dalam <https://iorj.hse.ru/data/2016/11/15/1110407997/M.M.%20Wihardja.pdf>

yang tertuang dalam IJEPA ketika menerima Menteri Muda Jepang untuk Urusan Luar Negeri Nobuo Kishi dalam pertemuan pada 6 maret 2017 di Jakarta.<sup>24</sup> Keinginan untuk meninjau ulang kerjasama IJEPA antara Indonesia dengan Jepang didasari pada tren perdagangan kedua negara yang terus menurun semenjak 2012.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L Marsudi mengatakan “Tinjauan ulang ini agar kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang yang telah berjalan dengan sangat baik dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai tantangan jaman sehingga tetap saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,”<sup>25</sup> Apabila dilihat dari tren peningkatan yang mencapai puncaknya pada tahun 2011 dengan total perdagangan kedua Negara mencapai USD 53,15 miliar dan terus menurun pada 2016 mencapai USD 29,08 miliar dengan nilai surplus perdagangan USD 14,27 miliar pada 2011 menjadi USD 3,11 miliar pada tahun 2016. Dengan penguatan kerjasama melalui peninjauan ulang kemitraan akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak untuk terus memperkuat kerjasama terutama dalam aspek perdagangan internasional kedua negara.

**Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Utama Tahun 2016**



<sup>24</sup> Pemerintah Ingin Tinjau Ulang Kerja Sama Indonesia – Jepang. Dalam <http://katadata.co.id/berita/2017/03/07/pemerintah-ingin-tinjau-ulang-kerja-sama-indonesia-jepang>

<sup>25</sup> Ibid.

Sumber : Katadata

Meskipun tren perdagangan yang terus menurun antara Indonesia dengan Jepang akan tetapi posisi Jepang masih di peringkat ketiga negara tujuan ekspor Indonesia. Meski demikian mengacu tren perdagangan di kuartal pertama tahun 2017 India mampu menggeser Jepang sebagai negara tujuan ekspor sehingga menjadi strategis ketika pemerintah Indonesia meninjau ulang kesepakatan kerjasama perdagangan Indonesia Jepang yang termaktub dalam kerjasama IJEPA.

Berbalik dari kinerja perdagangan Indonesia Jepang yang negatif selama 6 tahun belakangan ini, kinerja sektor investasi Indonesia Jepang menunjukkan trens sebaliknya. Jepang masih menjadi negara kedua terbesar yang menanamkan modal investasi di Indonesia. Sejumlah proyek strategis seperti Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta dan rencana investasi dalam pengerjaan proyek strategis seperti seperti pelabuhan internasional Patimban dan Blok Masela

**Tabel 2. Daftar 10 Negara Asal Investasi Asing Terbesar ke Indonesia pada Triwulan I 2017**



Sumber : Katadata dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/08/meskipun-turun-investasi-asing-singapura-tetap-yang-terbesar>

Begitu juga secara agregat perbandingan data perdagangan dan investasi Indonesia Jepang, menunjukkan fakta sebaliknya investasi Jepang ke Indonesia misalnya pada tahun 2007 tercatat hanya mencapai USD 603,4 juta dan berada di peringkat sembilan di bawah AS, Singapura, Malaysia meski secara akumulatif semenjak 1 Januari 1967 sampai dengan Desember 2007, Jepang telah membukukan investasi sebesar USD 40,1 milyar dalam 1.795 proyek. Berkebalikan pada tahun 2017, Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nilai investasi Jepang ke Indonesia pada 2016 melonjak 86 persen mencapai USD 5,4 miliar setara Rp 71,8 triliun dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 2,9 miliar.<sup>26</sup>

**Tabel 3 Nilai Investasi Jepang ke Indonesia 2011-2016**



Sumber : Berapa Nilai Investasi Jepang di Indonesia? Diakses dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/13/berapa-nilai-investasi-jepang-di-indonesia>

Peningkatan investasi Jepang dikarenakan membaiknya kinerja ekonomi Indonesia serta reformasi ekonomi yang memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat investasi global memberikan penilaian layak investasi untuk Indonesia. Seperti rilis *Moody's Investors Service* dan *Fitch*

<sup>26</sup> Berapa Nilai Investasi Jepang di Indonesia? Diakses dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/13/berapa-nilai-investasi-jepang-di-indonesia>

*Ratings* yang meningkatkan peringkat kredit Indonesia ke level layak investasi dan yang terbaru *Standard & Poor's (S&P) Global Ratings* menaikkan peringkat kredit luar negeri Indonesia dari BB+ menjadi BBB- yang berarti *Investment grade* Indonesia layak investasi. Kenaikan peringkat itu didasarkan kemampuan Pemerintah Indonesia mengelola anggarannya, baik penerimaan maupun pengeluaran, secara efektif.<sup>27</sup> Menurut data realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Triwulan III 2016 Jepang merupakan negara kedua terbesar yang menanamkan modalnya di Indonesia total USD 1,6 miliar dengan total 425 proyek.

### 2.2.2 Kerjasama Bidang Lingkungan

Pengarusutamaan isu lingkungan sebagai isu global menempatkan Jepang sebagai pemain global yang fokus menangani masalah lingkungan. Perubahan kebijakan Jepang yang menitikberatkan penanggulangan dampak lingkungan dapat di lihat sejak konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro Brazil, Jepang berupaya menjadi pemain global dalam mengatasi masalah lingkungan terutama penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2006 pemerintah Jepang juga telah menerapkan Green Konyuhoo (Japan's Green Purchasing Policy) yaitu kebijakan verifikasi produk kayu yang berasal dari kayu tebangan ilegal. Pemerintah Jepang juga terus mempromosikan *Cool Earth Partnership* yang digagas pada tahun 2008 dengan target mengurangi emisi Co2 sebanyak 50 persen pada tahun 2050. Kebijakan Cool Earth Partnership dikenal dengan *fukuda vision* yang menjadi landasan untuk menyusun *action plan for achiving low carbon society*.<sup>28</sup> Jepang terus agresif dalam penanggulangan isu lingkungan, pada tahun 2009 misalnya Jepang meningkatkan target penurunan emisi CO2 hingga 25 persen pada tahun 2020.

---

<sup>27</sup> S&P Akhirnya Kerek Peringkat Utang Indonesia Jadi Layak Investasi. Dalam <http://katadata.co.id/berita/2017/05/19/sp-akhirnya-kerek-peringkat-utang-indonesia-jadi-layak-investasi>

<sup>28</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. Development Cooperation in the Field of Climate Change. Dalam [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/environment/pdfs/cool\\_earth\\_pe.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/environment/pdfs/cool_earth_pe.pdf)

Kebijakan *Cool Earth Partnership* diimplementasikan oleh Jepang dengan mengalokasikan dana bantuan sebesar USD 10 milyar dalam jangka waktu lima tahun untuk mendukung negara-negara berkembang mengurangi emisi rumah kaca dan mengurangi dampak negatif akibat perubahan iklim.<sup>29</sup> Indonesia termasuk negara yang mendapatkan bantuan dari *Program Cool Earth Partnership* Jepang dengan memberi bantuan finansial melalui mekanisme *Official Development Assistant* (ODA).

Salah satu kerjasama lingkungan antara Jepang dengan Indonesia adalah kesepakatan dalam forum *Asia Forest Partnership* 2008-2011 yang bekerjasama dalam penanggulangan deforestasi di Indonesia. diantaranya dialog yang dilakuka dalam *The Second Round Of The International Expert Meeting On Illegal Logging* yang salah satu kesepakatanya yaitu pada tahun 2003 Jepang menandatangani rencana aksi bersama pengumuman dalam memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu liar dan produk kayu dengan Indonesia dan memastikan transparansi pengelolaan hutan dalam perdagangan kayu bagi negara-negara produsen pelaku ekspor maupun impor dan melibatkan bea cukai untuk mengendalikan perdagangan kayu ilegal.<sup>30</sup>

Selain itu yang terbaru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar bersama Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Kouichi Yamamoto telah menandatangani perpanjangan *Memorandum of Cooperation* (MoC) dalam bidang Lingkungan Hidup pada tanggal 10 April 2017 di Tokyo, Jepang. MoC kedua negara sebelumnya telah ditandatangani tahun 2012 dan berakhir tahun 2015. Selain untuk pengurangan emisi, Jepang juga memberikan bantuan finansial melalui ODA untuk konservasi satwa dan tumbuhan. Pada Februari 2017 misalnya Jepang memberikan bantuan bagi kepentingan konservasi satwa dan tumbuhan dari Jepang senilai 1 juta yen atau sekitar Rp 117 juta. Dana konservasi yang merupakan hasil kerja sama Taman Kembar (Sister Park) antara lembaga konservasi di luar habitat alami (*ex situ*) satwa liar Taman Safari Indonesia (TSI)

---

<sup>29</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. Financial Mechanism for "Cool Earth Partnership" dalam <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/wef/2008/mechanism.html>

<sup>30</sup> Ibid

Cisarua dengan Gunma Safari Park di Jepang.<sup>31</sup> Bantuan konservasi ini merupakan bantuan ke 16 kalinya dari Jepang untuk Indonesia.

Selain bantuan untuk pengurangan emisi dan konservasi, Jepang juga memberikan hibah kepada lembaga swadaya masyarakat diantaranya pada 2017 bantuan peningkatan lingkungan kesehatan di daerah bencana, pada 2018 bantuan peningkatan akses air bersih untuk senyum dan kesehatan. Ditahun 2008 juga digagas bantuan untuk pengembangan ramah lingkungan dengan aneka pemanfaatan jarak pagar (*Jatropha Curas*) di Indonesia dan berlanjut pada tahun 2009 untuk pengembangan ramah lingkungan dengan aneka pemanfaatan jarak pagar (*Jatropha Curas*) di Indonesia tahap II.<sup>32</sup>

### 2.2.3 Kerjasama Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan

Kerjasama dalam bidang sosial budaya dan pendidikan antara Indonesia dan Jepang terjalin cukup erat. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya lembaga persahabatan antara Jepang dengan Indonesia seperti *Japan – Indonesia Association (JAPINDA)*, *Organization Council Japan – Indonesia Friendship* (Nihon – Indonesia Yokodantai Kyogikai) sedangkan lembaga persahabatan yang didirikan Indonesia antara lain Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) yang diketuai oleh Mantan Menteri Perdagangan era pemerintah Joko Widodo, Rachmat Gobel, dan Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA).

Salah satu lembaga yang mengkampanyekan sosial budaya dan pendidikan Jepang untuk Indonesia seperti yang dilakukan Japan Foundation. Dibentuk berdasarkan rekomendasi hasil keputusan parlemen Jepang untuk mengenalkan budaya Jepang ke dunia internasional termasuk Indonesia pada tahun 1972 telah banyak menjalin kerjasama pertukaran budaya dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Yang terbaru pada bulan April 2014 Japan Foundation membuat program *The Japan Foundation Asia Center* yang memberikan kesempatan bagi

---

<sup>31</sup> Indonesia terima dana bantuan konservasi sejuta yen Jepang. Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/612078/indonesia-terima-dana-bantuan-konservasi-sejuta-yen-jepang>

<sup>32</sup> Realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Skema.Banutan Hibah NGO. Dalam [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_ngo.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_ngo.htm)

negara-negara di Asia, khususnya ASEAN, untuk menggagas dan mewujudkan ide pertukaran budaya melalui proyek kolaborasi melalui interaksi dan kolaborasi di bidang pendidikan bahasa Jepang, seni dan budaya, olahraga serta pertukaran intelektual.<sup>33</sup>

Jepang juga menjadi negara yang memberikan bantuan beasiswa bagi masyarakat Indonesia salah satunya beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang (Monbukagakusho/ MEXT). Beasiswa MEXT menanggung semua biaya studi dan biaya hidup, tanpa ikatan apapun. Menurut data kedutaan besar Jepang untuk Indonesia, saat ini sekitar 2500 siswa Indonesia tengah melanjutkan pendidikannya di Jepang yang sebagian besar menggunakan skema pembiayaan beasiswa baik dari pemerintah Jepang maupun dari korporasi Jepang yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.<sup>34</sup>

Peningkatan jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan jenjang studi di Jepang sangat besar dalam satu dekade belakangan ini. Misalnya sampai Oktober 2006, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang tercatat sebanyak 993 orang dan meningkat dua kali lipat lebih 10 tahun kemudian menjadi 2500 pelajar. Sebagian besar pelajar Indonesia di Jepang mengambil jurusan sains.

Skema bantuan pendidikan Jepang untuk Indonesia ditujukan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Lebih spesifik lagi pemerintahan Joko Widodo mendorong peningkatan kerjasama bidang pendidikan yang khusus untuk pendidikan vokasi (Kejuruan) dengan tujuan peningkatan SDM yang dapat menopang industri nasional.<sup>35</sup> Untuk meningkatkan keterampilan SDM Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Indonesia dan Jepang menandatangani MoU untuk melakukan penguatan vokasi industri di Indonesia. Kesepakatan yang akan dilakukan, yakni melalui program sinergi pada jalur pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi untuk meningkatkan

---

<sup>33</sup> Tentang The Japan Foundation. Dalam <http://www.jpff.or.id/id/>

<sup>34</sup> Beasiswa Pemerintah Jepang (MONBUKAGAKUSHO). Dalam <http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html>

<sup>35</sup> JokowiHarapInvestasiJepangTularkanDisiplinke SDM Indonesia. Dalam <http://regional.kompas.com/read/2017/04/25/12324411/jokowi.harap.investasi.jepang.tularkan.disiplin.ke.sdm.indonesia>

kompetensi tenaga kerja Indonesia. MoU ini ditandatangani pada Juli 2016, yang menekankan adanya pertukaran pengajar, siswa, serta kursus pendek serta memberikan sertifikasi kepada setiap karyawan dan siswa Indonesia yang mendapat pelatihan di Jepang.<sup>36</sup>

#### 2.2.4 Bantuan Luar Negeri (ODA) Indonesia – Jepang.

Indonesia merupakan negara penerima Bantuan Pembangunan Pemerintah (*Official Development Assistance, ODA*) terbesar dari Jepang pada tahun 2005, berdasarkan realisasi netto pembayaran yaitu sebesar USD1.22 milyar atau setara dengan kurang lebih 17 persen dari seluruh ODA yang diberikan Jepang. ODA sendiri mencakup tiga komponen yaitu **a. Pinjaman Yen** : Pinjaman Yen merupakan pinjaman bilateral antara Jepang dengan Indonesia. Pinjaman Yen memiliki persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah untuk kepentingan pembangunan di dunia berkembang. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*. **b. Bantuan Dana Hibah** yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan **c. Kerjasama Teknik** merupakan kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Tujuannya dengan peningkatan SDM maka dapat memberikan peranan dalam pembangunan. Mekanismenya dengan cara mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey, dan lain-lain. Kerjasama teknik dikerjakan oleh badan pemerintah independen yang didirikan Jepang yaitu *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.

ODA Jepang untuk Indonesia secara rinci melalui realisasi bantuan untuk tahun 2006 membukukan bantuan dengan nilai yang cukup besar dengan rincian pinjaman yen sebesar 125.2 miliar yen. Bantuan hibah 5.4 miliar yen (berdasarkan pertukaran nota-nota), kerjasama teknik 7.8 miliar yen (berdasarkan realisasi pembiayaan JICA)<sup>37</sup>. ODA Jepang juga berperan penting dalam upaya rekonstruksi

---

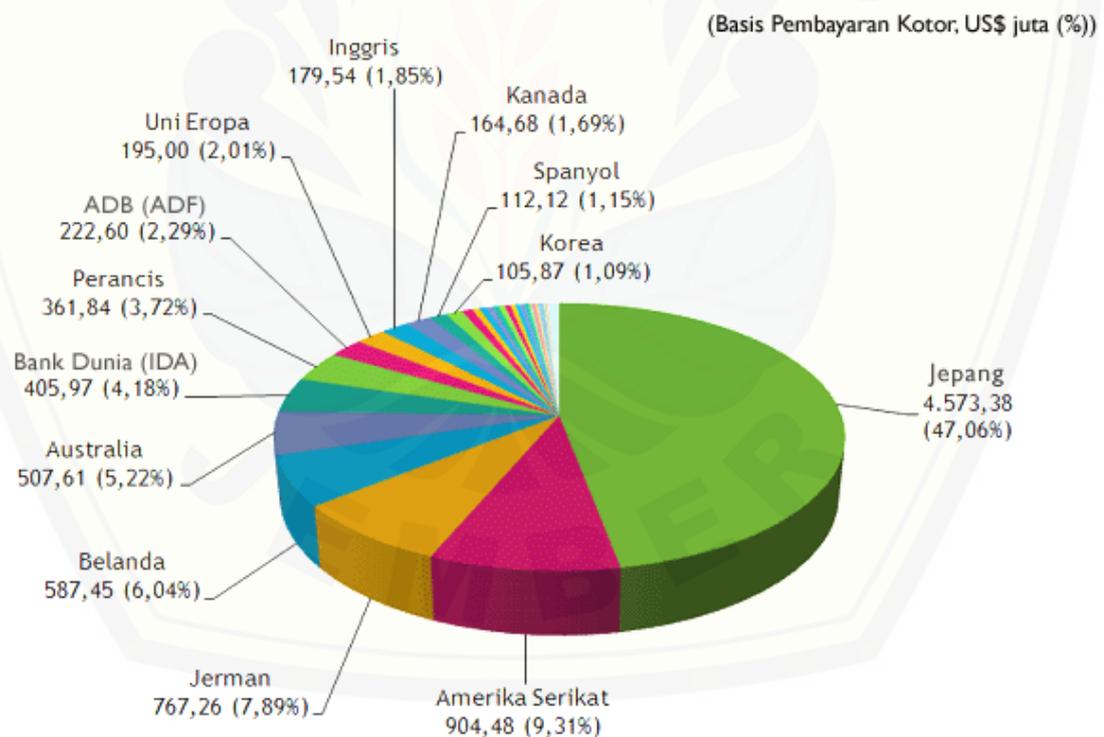
<sup>36</sup> Indonesia-Jepang tingkatkan kerjasama pendidikan vokasi. Dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/607077/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-sama-pendidikan-vokasi>

<sup>37</sup> Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Dalam [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html)

paska bencana tsunami Aceh tahun 2004 Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi bagi korban bencana sebesar USD 640 juta.

Mengacu pada data Bantuan luar negeri ke Indonesia Jepang menempati posisi tertinggi diantara negara asing lainnya dengan porsi yang cukup besar. Dalam rentang waktu 2001 sampai dengan 2005 bantuan Jepang setara dengan 47,06 persen total bantuan asing ke Indonesia. Apabila mengacu pada data perbandingan, Amerika dan Jerman yang berada di posisi kedua dan ketiga negara terbesar yang memberikan bantuan ke Indonesia hanya setara dengan 9,31 persen untuk Amerika Serikat dan 7,89 persen untuk Jerman. Hampir menyentuh empat kali lipat dari besaran bantuan AS untuk Indonesia dan lima kali lipat lebih besaran bantuan Jerman untuk Indonesia.

**Grafik 1. Perbandingan Bantuan ODA Jepang di Indonesia terhadap Bantuan Pemerintah Asing dan LSM Asing**

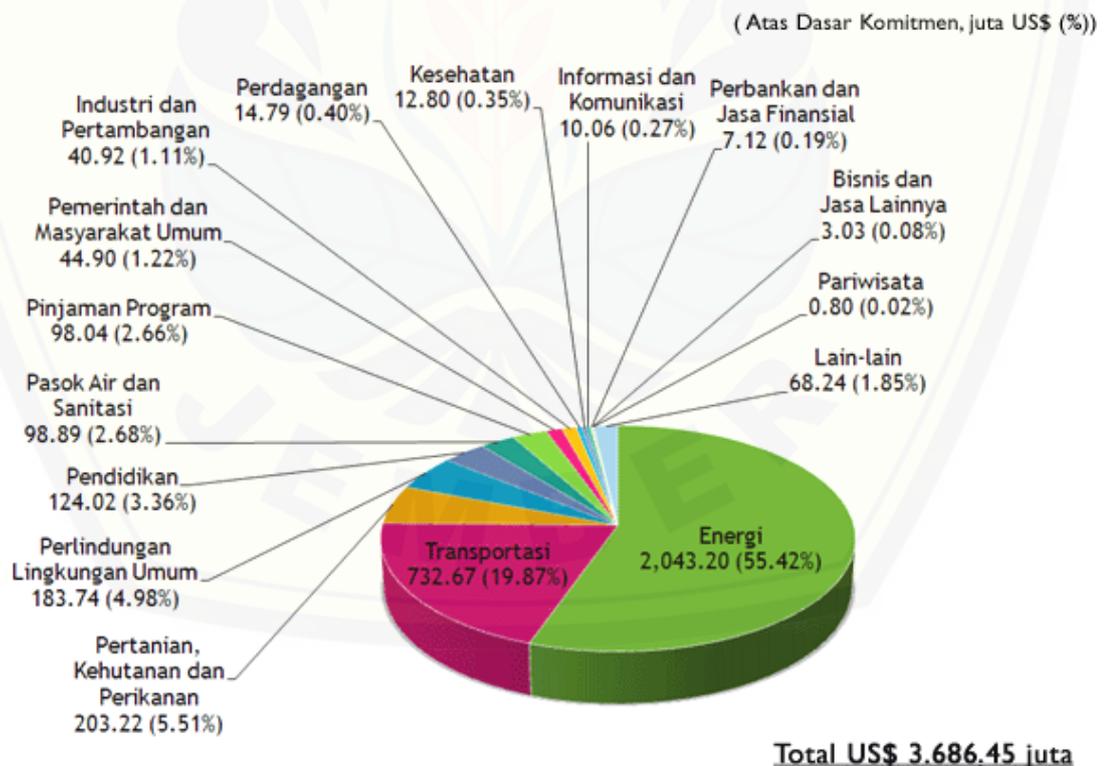


**Total US\$ 9.718.97 Juta**

Sumber: OECD/DAC

Bantuan ODA di tahun 2003 sampai dengan 2005 paling besar pada sektor energi yaitu sebesar 2,043.20 juta atau setara dengan 55,42 persen dari total jumlah bantuan ODA. Di posisi kedua, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendapatkan 203.22 juta atau setara dengan 5.51 persen dan di posisi ketiga sektor Perlindungan Lingkungan Umum mendapatkan bantuan ODA sebesar 183.74 juta atau setara dengan 4,98 persen sedangkan sektor yang paling sedikit mendapatkan bantuan ODA dari Jepang adalah bidang pariwisata yang memiliki porsi paling kecil dari semua sektor yaitu 0.80 atau hanya sekitar 0.02 persen dari total ODA pada tahun 2003-2005. Dengan perincian bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut bidang sebagai berikut.

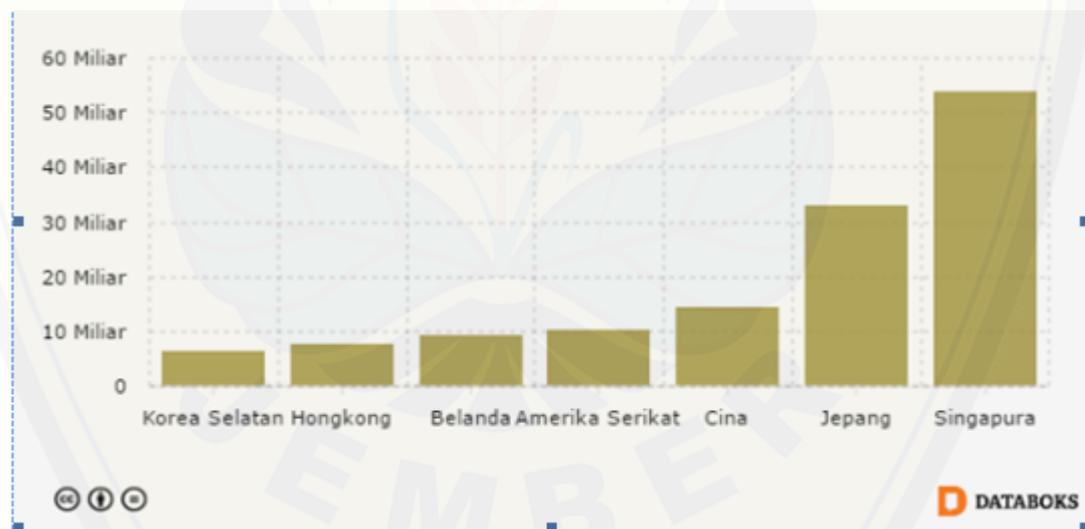
**Grafik 2. Perincian Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Bidang (Total) (2003 s/d 2005)**



Sumber : Perincian Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Bidang (Total) (2003 s/d 2005). Dalam [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat\\_04a.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04a.htm)

Ketiga komponen dalam kerjasama bantuan luar negeri Jepang, bantuan yen menempati bantuan paling besar dari kedua komponen dalam ODA yaitu Hibah dan Teknik. Jepang menempati posisi kedua negara yang memberikan pinjaman luar negeri paling besar kedua setelah Singapura. Tercatat pinjaman luar negeri Indonesia ke Singapura mencapai USD 54.061 juta sedangkan Jepang di urutan kedua dengan jumlah USD 32.907 juta. Bantuan luar negeri ini bertujuan untuk pembangunan nasional dan untuk meningkatkan roda perekonomian nasional. Pinjaman luar negeri ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, menutupi kekurangan anggaran, modal pembangunan, serta bentuk kerja sama bilateral antar negara. Meski demikian, utang luar negeri juga akan berdampak pada penambahan beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

**Tabel 4. Pinjaman Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Negara (Oktober 2016)**



Sumber : Bukan Cina, Kreditor Terbesar Indonesia adalah Singapura dan Jepang. Dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/27/cina-termasuk-kreditor-terbesar-indonesia>

### 2.2.5 Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan.

Besarnya investasi Jepang ke Indonesia yang mencapai USD 4,498 miliar atau setara dengan Rp59,8 triliun pada 2016 dengan kontribusi investasi paling tinggi di Indonesia melalui industri otomotif dengan nilai USD 1,18 miliar pada tahun 2015 dan pembangunan kawasan industri dan properti USD 520 juta serta industri logam, elektronik, dan mesin senilai USD 426 juta membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi Indonesia. Pada sektor industri otomotif beberapa perusahaan multinasional Jepang seperti Toyota yang akan melakukan ekspansi di Indonesia, dan yang terbaru pembukaan pabrik Mitsubishi di *Greenland International Industrial Center (GIIC)* Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat menelan investasi Rp 7,5 triliun dan akan membuka 3.000 lapangan kerja di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 25 April 2017.<sup>38</sup>

Pembukaan lapangan pekerjaan oleh perusahaan Jepang di Indonesia juga akan diikuti dengan program peningkatan mutu SDM Indonesia yang bekerja di perusahaan multinasional Jepang seperti yang dilakukan Toyota melalui mendirikan sebuah akademi manufaktur otomotif, *Toyota Indonesia Academy (TIA)*. Akademi manufaktur otomotif Toyota akan setara dengan pendidikan tingkat Diploma 1 (D1) bagi para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan keahlian di bidang manufaktur otomotif. Pendirian TIA menelan investasi sekitar 70 miliar rupiah. Komitmen kerjasama ketenagakerjaan antara Jepang dan Indonesia merupakan bagian dari kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Salah satu kerjasama ketenagakerjaan yang berdasarkan pemerintah dengan pemerintah (*government to government, G to G*) adalah penempatan TKI di sektor formal ke Jepang. Selain itu kerjasama ketenagakerjaan Indonesia Jepang juga berdasarkan *business to business (B to B)* seperti yang dilakukan Toyota Indonesia Academy dengan melakukan peningkatan SDM Indonesia.

---

<sup>38</sup> Resmikan Pabrik Mitsubishi, Jokowi Tegaskan Investasi Tak Boleh Dipersulit. Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/11324241/resmikan.pabrik.mitsubishi.jokowi.tegaskan.investasi.tak.boleh.dipersulit>

Kerjasama ketenagakerjaan G to G antara Jepang dan Indonesia juga terus meningkat. Berdasarkan data Kemnakertrans, selama tahun 2011 pemagangan luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan *International Management Development Organization Japan* (IMM Japan) maupun lembaga pelatihan swasta ke Jepang telah mengirim sebanyak 2.160 orang.<sup>39</sup> Kerjasama ketenagakerjaan kedua negara menjadi bagian integral dari kerjasama dibidang ekonomi melalui kerangka IJEPA

### **2.3 Regulasi Program Pemagangan Luar Negeri antara Kemenakertrans dengan IMM Japan.**

Pengkajian mengenai peraturan pelaksanaan program pemagangan luar negeri dengan mengkaji regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diantaranya Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 08 tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan program pemagangan di luar negeri. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemagangan diatur di dalam bab V mengenai pelatihan kerja undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pasal 21 hingga pasal 30. Pasal 21 no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mewajibkan pelatihan kerja diselenggarakan dengan sistem pemagangan dan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta dengan pengusaha.

Pada kasus kerjasama ketenagakerjaan program pemagangan antara Kemenakertrans dengan IMM Jepang dilakukan dengan perjanjian tertulis melalui MoU dan pelatihan kerja bahkan dalam perjanjian MoU pada *Article 1 Objectives of the MOU for MOMT (Memorandum of Understanding Between The Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprise, Japan on Technical Intern Training Program for Indonesian Technical Interns in Japan, February 2010* di jelaskan cukup rigid bahwa tujuan dari perjanjian (MOU)

---

<sup>39</sup> Menakertrans harap kerjasama dengan Jepang ditingkatkan. Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/330938/menakertrans-harap-kerja-sama-dengan-jepang-ditingkatkan>

antara Pemerintah Negara Jepang dengan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian tehnik dengan cara melakukan proses alih teknologi dan pengetahuan dari setiap perusahaan yang ikut serta dalam program magang tersebut (*accepting organization*) dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi bagi negara Indonesia pada umumnya sedangkan ketentuan adanya perjanjian pemagangan dalam proses pemagangan diatur didalam *Articel 5*.<sup>40</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan regulasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai persyaratan adanya perjanjian pemagangan. Persyaratan mengenai perjanjian pemagangan ini melindungi peserta magang dari praktek-praktek kerja illegal di negara lain dan juga memberikan kewajiban serta sanksi apabila peserta melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemagangan. Dalam kerjasama IMM dengan Kemenakertrans yang diatur dalam *articel 5*, peserta program IMM Jepang dengan Kemenakertrans perlindungan langsung diberikan oleh pemerintah Jepang.

Pada MoU sebelum amandemen pemerintah Jepang tidak memberikan jaminan penuh dan ditanggung oleh sending organization karena belum adanya perubahan undang-undang tenaga kerja Jepang dan amandemen terhadap undang-undang Jepang baru terjadi pada tahun 2010 yang juga berimplikasi merubah MoU antara IMM Jepang dengan Kemenakertrans. Sebelum amandemen, peserta magang hanya dijamin oleh pemerintah Indonesia seperti tenaga kerja pada umumnya. Sebagaimana perubahan perundang-undang ketenagakerjaan Jepang

---

<sup>40</sup> *Article 5 and Article 6 Article 1 Objectives of the MOU for MOMT (Memorandum of Understanding Between The Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprise, Japan on Technical Intern Training Program for Indonesian Technical Interns in Japan, February 2010. Dalam Andari Yurikosari Review. Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri Dalam Rangka Penempatan (Studi Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2008). Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015 edisi I*

yang menyatakan bahwa semua pekerja (baik warga Jepang maupun asing) mengikuti sistem perundang-undangan Jepang sebagai berikut.<sup>41</sup>

- *Article 12-1 of the Act provides that with employment agreements, mandatory provisions of the labour laws of the most closely related law applies as well as the agreed governing law at the request of the employees.*
- *Article 12-2 provides that a country where the employee physically provides services is deemed to be the most closely related law.*

Ketentuan ini akan mengatur tentang hak dan kewajiban terutama terkait implikasi program pemagangan adalah dilindunginya para pemegang dan sistem gaji penuh sama seperti para pekerja Jepang. Hal ini berbeda sebelum adanya amandemen yang sistem penggajiannya didasarkan pada besaran kerjasama antara kedua belah pihak. Perubahan amandemen kerjasama ini berimplikasi pada perubahan semua kerjasama tentang ketenagakerjaan dengan negara lain dalam hal ini adalah kerjasama pemagangan IM Jepang dengan Kemenakertrans. Seperti yang dikemukakan Menakertrans Muhaimin Iskandar tahun 2010 mengatakan “*dengan adanya perlindungan penuh dan berlakunya UU ketenagakerjaan baru Jepang maka tenaga magang Indonesia disetarakan dengan tenaga kerja Indonesia pada umumnya yang bekerja di negeri Matahari Terbit tersebut. Kesetaraan itu mencakup kenaikan gaji, jaminan perlindungan, dan status yang diakui sebagai tenaga kerja*”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Yumiko Ohta, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Employment and employee benefits in Japan: overview. Laws applicable to foreign nationals. Dalam [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-503-3920?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-503-3920?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)

<sup>42</sup> Tenaga Kerja Magang RI ke Jepang Dapat Perlindungan Penuh. Dalam <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1290113/tenaga-kerja-magang-ri-ke-jepang-dapat-perlindungan-penuh>

### **BAB 3. KEBIJAKAN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN ANTARA KEMENAKERTRANS INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAPAN (IMM)**

#### **3.1 Sistem Ketenagakerjaan Indonesia – Jepang**

Indonesia dan Jepang sebagai negara Asia memiliki karakteristik yang berbeda terutama terkait kinerja ekonomi. Jepang setelah restorasi meiji sukses menjalankan industrialisasi dan berhasil bertransformasi menjadi negara maju (*advanced industrial country*) sedangkan industrialisasi Indonesia berjalan melambat bahkan struktur industri Indonesia tidak banyak berubah semenjak merdeka yaitu masih ditopang sektor industri berbasis komoditas. Berbeda dengan Jepang yang digolongkan sebagai negara maju dengan output ekonomi yang besar dengan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 4.383.1 triliun pada 2016 sedangkan Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang dengan nilai PDB sebesar 861 triliun pada 2016. Perbedaan keduanya berimplikasi pada perbedaan kedua negara terkait sistem ketenagakerjaan kedua negara. Jepang memiliki sistem yang cenderung rigid dan baku dengan sistem pengupahan yang besar sedangkan Indonesia masih memiliki sistem ketenagakerjaan yang lunak seperti masih adanya sistem *outsourcing* serta memiliki sistem pengupahan minimum yang masih rendah serta kualitas tenaga kerja yang didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*).

##### **3.1.1 Sistem Ketenagakerjaan Indonesia**

Sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan. Apabila dirunut setelah Reformasi, sistem ketenagakerjaan diatur melalui UU NO 13 tahun 2003 yang terdiri dari XVIII Bab dan 193 Pasal yang mengatur setidaknya empat ketentuan pokok yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja. Sistem pengupahan di Indonesia didasarkan pada upah minimum regional baik wilayah maupun di tingkat kabupaten/kota. Acuan penentuan upah minimum didasarkan

pada profuktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya upah minimum besaran gaji tidak boleh lebih rendah dari besaran upah minimum.

**Tabel 5. Upah Minimum Indonesia (Perbulan dalam Juta)**



**Sumber:** Indonesia Minimum Monthly Wages Forecast 2016-2020. Dalam <https://tradingeconomics.com/indonesia/minimum-wages/forecast>

Sistem ketenagakerjaan Indonesia juga mengatur tentang sistem kontrak kerja dan pemberhentian hubungan kerja yang diatur dalam UU NO 13 tahun 2003. Ada dua mekanisme pemberhentian, pertama secara sukarela dan yang kedua diberhentikan oleh perusahaan. Secara konsepsi sebenarnya sudah begitu rigid misalnya ketentuan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada adanya perundingan kedua belah pihak dan jika perundingan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang mendasarinya seperti yang dibahas dalam UU NO 13 tahun 2003 pasal 152.

Terkait hubungan kerja, sistem ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja didasarkan pada kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yang dibenakan kedalam beberapa bentuk diantaranya a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya

dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Waktu kerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia sebesar 8 jam kerja mengikuti sistem waktu kerja yang juga diterapkan di dunia industri maju. Apabila perusahaan memberlakukan pekerja melebihi waktu kerja 8 jam maka dihitung sebagai waktu lembur akan tetapi apabila tidak dihitung sebagai waktu lembur maka perusahaan dapat dikenai sanksi. Sistem ketenagakerjaan Indonesia juga mengatur tentang sistem pekerja *outsourcing*. *Outsourcing* dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum *outsourcing* (Alih Daya). *Outsourcing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2002 Pasal 66 ayat (2) huruf b yang mengatur perjanjian kontrak kerja dengan antara perusahaan penyedia pekerjaan dengan pemberi pekerjaan melalui dua tahapan perjanjian yaitu

1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh ;
2. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis

Artinya dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja sehingga pekerja tidak secara langsung berhadapan dengan perusahaan dimana dia bekerja.

Konsep *Outsourcing* pada tenaga kerja mempermudah pengusaha mendapatkan tenaga kerja dengan biaya murah dan syarat kerja rendah karena

perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya perlindungan tenaga kerja, seperti jaminan sosial, PHK, dll. Sedangkan dari sisi pekerja konsep outsourcing atau buruh kontrak dapat mengurangi jaminan sosial yang dapat mereka terima karena tidak adanya perjanjian kerja tertulis dan dilakukan perpanjangan masa kontrak berulang-ulang tanpa ada kepastian menjadi pekerja tetap.<sup>43</sup> Dalam sistem kerja *outsourcing* buruh berhadapan dengan penyedia tenaga kerja sehingga semua peraturan mengikuti kontrak yang dilakukan di awal dengan penyedia tenaga kerja mulai dari negosiasi gaji sampai dengan perpanjangan kerja. Sistem *outsourcing* memberikan ketidakpastian kerja karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan dari pekerjaannya tanpa pesangon. Penggunaan tenaga *outsourcing* dikarenakan permasalahan klasik ketenagakerjaan di Indonesia yaitu adanya kelebihan tenaga kerja (*over supply*) dan sedikitnya lapangan pekerjaan (*permintaan, demand*) terutama di daerah dan perkotaan menyebabkan pengusaha memanfaatkan *outsourcing* dalam melakukan efisiensi perusahaan.

Sistem *outsourcing* sebelum diatur dalam UU no 13 tahun 2002 dikenal dengan sebutan pekerjaan sub-kontrak yang didasarkan pada dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan melalui keputusan Menteri Perdagangan RI No.264/KP/1989 tentang pekerjaan sub-kontrak perusahaan pengolahan di kawasan Berikat. Evolusi sistem kerja alih daya kembali ditegaskan dengan pengeluan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.135/KP/VI1993 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat<sup>44</sup>

### 3.1.2 Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi terus meningkat, World Bank memprediksi pada tahun 2018 ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,3 persen dari pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2017 yaitu sebesar 5,01

---

<sup>43</sup> Sistem Outsourcing: Peluang dan Tantangan Permasalahan Ketenagakerjaan. Dalam <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/ketenagakerjaan/69-sistem-outsourcing-peluang-dan-tantangan-permasalahan-ketenagakerjaan>

<sup>44</sup> Saptorini, I dan Jafar Suryomenggolo.2005. *Kekuatan Sosial Serikat Buruh: Putaran Baru dalam Perjuangan Menolak Outsourcing*. Jakarta: Trade Union Right. Hal 59

persen.<sup>45</sup> Tren positif kinerja ekonomi Indonesia menjadi capaian yang menjanjikan dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah seperti deregulasi melalui paket ekonomi, lalu pembangunan infrastruktur yang besar-besaran serta reformasi perpajakan melalui kebijakan *Tax Amnesty*. Selain itu pertumbuhan ekspor Indonesia dan mulai naiknya harga komoditas global menjadi penyebab membaiknya kinerja ekonomi.

Apresiasi membaiknya kinerja ekonomi tidak hanya berasal dari World Bank, sejumlah lembaga pemeringkat seperti *Moody's Investors Service*, *Fitch Ratings* dan *Standard & Poor's (S&P) Global Ratings* menaikkan status Indonesia sebagai negara layak investasi, hasilnya menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terjadi peningkatan realisasi investasi dari pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 612,9 Triliun atau 12,4 persen dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 545,4 triliun.<sup>46</sup> Meningkatnya investasi ke Indonesia lebih banyak ke sektor industri manufaktur yang artinya dengan mulai membaiknya industrialisasi di Indonesia maka semakin membesarnya kesempatan kerja yang akan di buka. Dengan melihat sebaran realisasi investasi berdasarkan sektor dan membaiknya ekonomi Indonesia setidaknya target penurunan pengangguran dalam pasar tenaga kerja Indonesia dapat ditekan sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2019 sebesar 6 persen.

Mengacu pada sebaran realisasi investasi pada tahun 2016 yang di dominasi sektor industri seperti industri kimia dasar dan farmasi untuk realisasi investasi dalam negeri dan industri logam, mesin dan elektronik untuk realisasi investasi asing maka setidaknya membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap pasar tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi tidak terjadi demikian, Penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih sangat rendah, sebanyak 32% dari 2.381.841 jumlah lowongan kerja yang terdaftar ternyata tidak dapat terisi oleh para pencari

---

<sup>45</sup> 2018, Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Naik 5,3 Persen. Dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170615165201-78-222016/2018-bank-dunia-prediksi-ekonomi-indonesia-naik-53-persen/>

<sup>46</sup> Realisasi Penanaman Modal Pmdn - Pma Triwulan Iv Dan Januari – Desember Tahun 2016. 25 Januari 2015. Dalam [http://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi\\_indonesia/file/Bahan\\_Paparan\\_TW\\_IV\\_2016.pdf](http://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf)

kerja hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan serta tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Data pada Agustus 2011, jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah tercatat 54,1 juta orang. Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi baru hanya 8,8 persen.<sup>47</sup> Meski apabila dilihat kondisi tenaga kerja Indonesia masih sangat bagus dengan angka tenaga kerja yang bekerja sebesar 120 juta pekerja begitu besar dari porsi jumlah angka kerja Indonesia yang menyentuh 127 juta. Dibanding angka tenaga kerja yang tidak bekerja sebesar 7 juta dari jumlah angka tenaga kerja yang mencapai 127 juta maka jumlah pengangguran relatif kecil akan tetapi apabila di lihat secara kuantitas jumlah tenaga kerja Indonesia sangat besar porsi dari tenaga kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan. Belum lagi terkait faktor kualitas tenaga kerja yang masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah serta banyaknya tenaga kerja yang terserap di dalam pekerjaan informal.

Perbandingan data pengangguran regional Asia Tenggara misalnya Indonesia menempati posisi ketiga dengan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,2 persen sedangkan diatas Indonesia ada Filipina dan Brunei Darussalam yang mencatatkan angka pengangguran masing-masing 6,5 dan 6,9 persen. Sedangkan negara dengan penyerapan angkatan kerja terbesar adalah Kamboja dan Thailand sehingga tingkat pengangguran kedua negara tersebut rendah. Dari data perbandingan tingkat terbuka di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara tertinggi untuk tenaga kerja pemuda yang menganggur sebesar 22 persen bahkan melewati rata-rata pengangguran pemuda di Asia Tenggara sedangkan dibawah Indonesia ditempati oleh Filipina dan Malaysia.

Berbeda dengan pemuda di Vietnam dan Thailand, mereka memiliki tingkat keterserapan yang relatif tinggi dibanding hampir semua negara di Asia Tenggara. Data pengangguran di Indonesia yang didominasi pemuda menjadi

---

<sup>47</sup> Pendidikan Mempengaruhi Kualifikasi Tenaga Kerja. Dalam <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/pendidikan-mempengaruhi-kualifikasi-tenaga-kerja>

sangat riskan Indonesia terjebak apa yang disebut dengan *middle income trap*<sup>48</sup> dimana dengan pertumbuhan demografi yang ditopang sebagian besar penduduk usia muda, Indonesia harus mampu menyerap tenaga kerja yang mayoritas pemuda. Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030 atau dalam artian bahwa Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif pada tahun 2020-2030.<sup>49</sup>

Menggunakan asumsi pertumbuhan usia profuktif yang cukup besar diatas apabila terserap semua kedalam pasar tenaga kerja maka Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi *high income* dan akan bertransformasi menjadi negara maju akan tetapi ketika Indonesia gagal menyerap tenaga kerja produktif maka akan terjadi pengangguran yang semakin besar dan menjadi beban bagi Indonesia atau disebut juga dengan jebakan kelas menengah (*middle income trap*). Jepang merupakan negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi, dimana ketika Jepang melakukan industrialisasi melalui restorasi meiji, struktur demografi Jepang mirip apa yang terjadi di Indonsia sekarang dimana jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding jumlah penduduk usia tua. Sedangkan dalam konteks Asia Tenggara, Singapura merupakan negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat dan menaikkan status negara Singapura menjadi negara dengan status negara berpendapatan tinggi dan dikategorikan sebagai negara maju. Belajar dari beberapa negara yang berhasil keluar dari *middle income trap*, tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja.

---

<sup>48</sup> Middle-income trap adalah istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah (*middle-income countries*) yang “terjebak” di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru

<sup>49</sup> BKKBN: Indonesia Mendapat Bonus Demografi pada 2020. Dalam <http://www.antaraneews.com/print/145637/bkkbn-indonesia-mendapat-bonus-demografi-pada-2020>

Tabel 6. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Asia Tenggara



Sumber : Is this the answer to youth unemployment in East Asia?  
<https://www.weforum.org/agenda/2016/05/youth-unemployment-in-east-asia/>

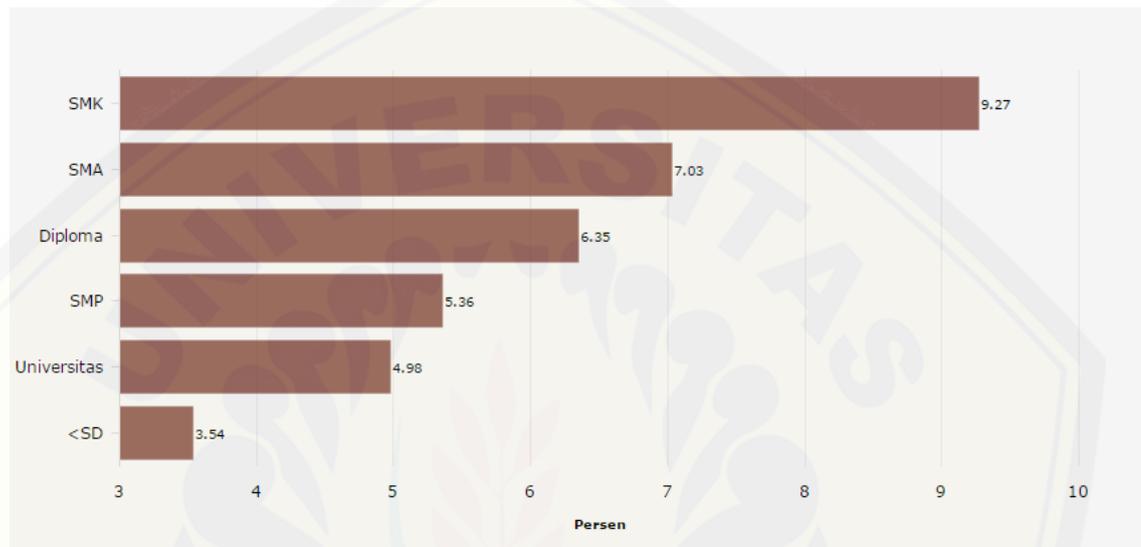
Permasalahan rendahnya penyerapan tenaga kerja tidak hanya didasarkan pada rendahnya lapangan pekerjaan baru yang diciptakan akan tetapi rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja sehingga tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan. Changyong Rhee dalam *Indonesia risks falling into the middle-income trap* menyebutkan bahwa Indonesia memiliki resiko dan berpotensi terjebak dalam jebakan kelas menengah.<sup>50</sup>

Rhee mengatakan salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia (*poor labor market conditions*) dan buruknya kualitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penyebab *middle income trap*. Argumentasi Rhee mendapat pembedannya ketika mengacu pada angka pengangguran cukup tinggi yang dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, jauh lebih tinggi dari angka rata-rata pengangguran secara nasional dan didominasi oleh siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan

<sup>50</sup> Changyong Rhee. *Indonesia risks falling into the middle-income trap*. Dalam <https://www.adb.org/news/op-ed/indonesia-risks-falling-middle-income-trap-changyong-rhee>

menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional. Juga menurut laporan World Economic Forum 2015, Indonesia saat ini sedang kekurangan akut sumber daya manusai (SDM) yang mampu menduduki kursi manajerial. Pada 2020, diproyeksikan Indonesia hanya mampu menyediakan 56 persen dari kebutuhan SDM untuk posisi manajer tingkat menengah<sup>51</sup>.

**Tabel 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan**



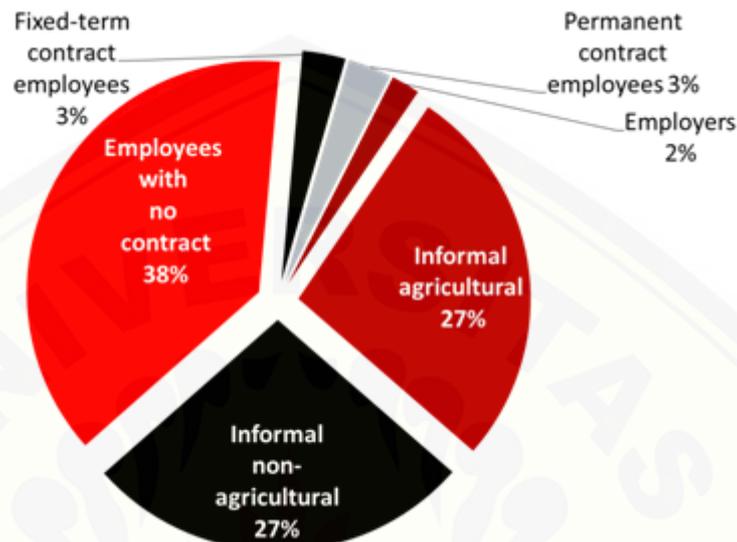
Sumber : Katadata. Dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/08/ternyata-lulusan-smk-paling-banyak-menganggur>

Selain rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia, status dari tenaga kerja Indonesia juga mengkhawatirkan yaitu mayoritas masih di dominasi oleh tenaga kerja yang bekerja tapi tidak memiliki kontrak kerja atau memiliki kontrak tetapi tidak langsung kepada pemberi kerja tapi pada penyedia lapangan kerja atau disebut juga sebagai tenaga *outsourcing*. Pekerja dengan permanen kontrak hanya sebesar 3 persen dan 3 persen lainnya pegawai yang memiliki kontrak resmi. Selain itu sektor informal cukup mendominasi baik di sektor pertanian maupun sektor informal non agricultural yang memiliki proporsi cukup besar yaitu 27 persen di masing-masing sektor. Atau apabila disatukan baik yang

<sup>51</sup> Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-3 di Asia Tenggara. Dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/pengangguran-indonesia-tertinggi-3-di-asean>

dari sektor pertanian maupun non pertanian jumlah sektor informal mencapai 54 persen dari total status pekerjaan tenaga kerja Indonesia.

**Grafik 3. Status Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia.**



Source: World Bank, presented by Shubham Chaudhuri at Kompas Economic Panel Discussion, June 21, 2012.

Mengacu pada data kondisi pasar tenaga kerja Indonesia, pemerintah melakukan inventarisasi masalah dan merumuskan kebijakan terhadap penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan mengeluarkan beberapa poin kebijakan. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan beberapa rumusan sebagai berikut<sup>52</sup>:

1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/subsektor yang produktifitasnya tinggi.
2. Meningkatnya jumlah pekerja yang berpendapatan menengah
3. Meningkatkan jumlah tenaga terampil menghadapi keterbukaan pasar

<sup>52</sup> Rahma Iryanti. arah kebijakan ketenagakerjaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam <https://www.slideshare.net/RestlessDita/04-des-2014rorennakerindeksketenagakerjaanv2>

4. Terciptanya hubungan industri yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha.
5. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap guncangan lapangan kerja dan upah
6. Melengkapi pekerja rentan dengan keahlian yang diperlukan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja
7. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja.

Penekanan dalam rumusan Arah kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah menekankan salah satunya pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar dapat terserap dalam pasar tenaga kerja. Salah satu kebijakan yang menysasar peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah kerjasama bilateral dengan negara industri maju yang diharapkan dapat memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada pekerja Indonesia seperti yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenakertrans) dengan IMM (*International Manpower Development of Medium and Small Enterprises*) Jepang yang dimulai pada tahun 1993 dan diamandemen pada 1 Februari 2010.

### 3.1.3 Sistem Ketenagakerjaan Jepang

Jepang sebagai negara maju (*Advanced Industrial Country*) memiliki sistem ketenagakerjaan yang sudah rigid dan mapan. Sebelum terjadinya restorasi meiji, Jepang sudah menerapkan undang-undang *Roudoukijunbi* yang mengatur batasan ketenagakerjaan di Jepang seperti pembatasan jam kerja dan penetapan sistem upah standar minimal.<sup>53</sup> Industrialisasi Jepang paska restorasi Meiji yang menekankan industri manufaktur memaksa Jepang melakukan perubahan terhadap sistem ketenagakerjaan yang menekankan tiga prinsip yaitu a. Pekerjaan Seumur Hidup (*Shuushin Koyousei*), b. Pengupahan Berdasarkan senioritas (*Nenkoujousei*), c. Serikat pekerja berbasis korporasi (*kigyo betsu kumiai*).

Perubahan peraturan ketenagakerjaan Jepang performa individu dinilai dari waktu ke waktu dimana promosi didasarkan atas tahun kerja termasuk

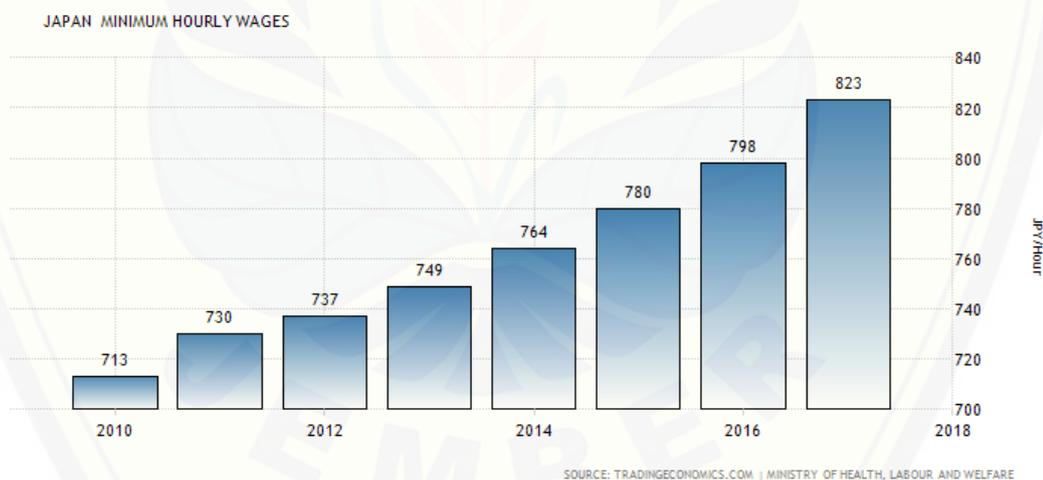
---

<sup>53</sup> Hideki Thurgood kano dan James M Minamoto. Labor and Employment Law in Japan dalam Philip M Berkowitz dan Thomas Muller Bonnani. International law and Employment Law. 2008. ABA Publishing. Hal. 115

kemampuan dan performa. Reformasi ketenagakerjaan setelah restorasi Meiji sangat menekankan profesionalisme, dimana bekerja dilarangkecualli diperbolehkan oleh hukum, tidak boleh mengambil keuntungan dari campur tangan di dalam pekerjaan orang lain. Selain itu pembatalan kontrak yang melanggar hukum karena tidak memenuhi standar ketenagakerjaan Jepang. Sistem jam kerja yang sudah dikenal sejak sistem *Roudoukijunbi* ditentukan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Selain itu juga adanya jam istirahat. Dengan penerapan peraturan yang cukup ketat, apabila perusahaan melanggar dengan memberlakukan jam kerja melebihi ketentuan maka dikenakan tambahan upah.

Keberhasilan melakukan restorasi meiji, Jepang bertransformasi menjadi negara industri maju dengan volume ekonomi terbesar di Asia pada medio tahun 1990-an sehingga besaran upah di Jepang termasuk paling tinggi di regional Asia sehingga Mayoritas perusahaan mencari pekerja yang baru lulus karena dianggap sebagai sumber tenaga kerja yang murah dan bisa dilatih serta dibentuk sesuai kebutuhan.<sup>54</sup>

**Tabel 8. Upah Minimum Jepang (Perjam)**



Sumber : Japan Minimum Hourly Wages dalam <https://tradingeconomics.com/japan/minimum-wages>

Sistem pengupahan di Jepang ada dua mekanisme yaitu upah minimum regional yang ditetapkan berdasarkan prefektur dan diberlakukan untuk tenaga

<sup>54</sup> Dengan nilai tukar per 1 yen setara dengan 120.82 rupiah maka upah minimum Jepang perjamnya sebesar 823 setara dengan Rp 99.450.. Data upah minimum Jepang dapat di akses di <https://tradingeconomics.com/japan/minimum-wages>

kerja yang bekerja di prefektur tersebut. Upah ini direvisi setiap tahun pada bulan oktober dan Upah minimum tertentu (berdasarkan industri) yang diberlakukan untuk tenaga kerja yang bekerja di bidang industri tertentu di prefektur tersebut.<sup>55</sup> Rumusan dasar gaji pokok di Jepang didasarkan pada klasifikasi kerja (*shokkaisei*) dan umur serta pengalaman (*nenrei keiken kyuu*).

Akan tetapi sistem *Nenkoujoretsu* yang diadopsi Jepang semenjak restorasi meiji berubah ketika Jepang bertransformasi menjadi negara maju dengan segala permasalahan yang kompleks seperti gejala stagnasi ekonomi berkepanjangan semenjak tahun 1990an sampai sekarang menjadikan ekonomi Jepang hanya mampu tumbuh di kisaran 1 persen serta masalah demografi Jepang yang mengalami *aging society* (*Koureika shakai*) dan membengkaknya dana pensiun mengakibatkan sistem tenagakerja Jepang juga mengalami perubahan dengan mengadopsi sistem penggajian tidak lagi berdasar senioritas tetapi berdasarkan performa. Selain itu faktor mendasar lainnya dari sistem ketenagakerjaan Jepang adalah ketenagakerjaan seumur hidup.

Sistem Ketenagakerjaan seumur hidup menjadikan pekerja Jepang memiliki status dan posisi yang kuat ketika harus berhadapan dengan perusahaan. Mengacu pada penganugrahan nobel ekonomi 2016 yang dimenangkan Oliver Hart dan Bengt Holmstrom yang berkontribusi terhadap teori kontrak yaitu dengan asumsi ketika kontrak kerja semakin rigid maka akan meningkatkan kinerja maka bisa disimpulkan salah satu kesuksesan transformasi industri Jepang karena faktor kejelasan kontrak kerja dengan sistem ketenagakerjaan seumur hidup.<sup>56</sup> Ketenagakerjaan seumur hidup yang dilaksanakan di Jepang dapat memberikan jaminan pekerjaan yang mencapai usia pengunduran diri/pensiun, yang bervariasi antara 55-60.

---

<sup>55</sup> Isao Ohashi. The Minimum Wage System in Japan: In Light of Circumstances in the United States and Europe. *Japan Labor Review*, Vol. 8, no. 2 Spring 2011. Hal 18-19

<sup>56</sup> The Prize in Economic Sciences 2016. Dalam [https://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html](https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html)

### 3.1.4 Pasar Tenaga Kerja Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki upah tenaga kerja paling tinggi di Asia. Hal ini dikarenakan status Jepang sebagai negara industri maju. Kesuksesan Jepang dalam proyek industrialisasi yang dimulai sejak restorasi meiji membawa Jepang sebagai negara dengan output ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat. Kinerja ekonomi Jepang di awal restorasi meiji sangat mengesankan dengan mampu tumbuh rata-rata dua digit pertahunnya pada dekade tahun 1960-an. Kesuksesan ekonomi Jepang terus menurun dekade tahun 1980-an dengan hanya tumbuh di kisaran 4-5 persen pertahunnya dan puncaknya pada dekade tahun 1990-an ekonomi Jepang terus melambat dan hanya tumbuh 1-2 persen pertahun sampai dengan sekarang. Banyak analis, salah satunya Lawrence Summers yang menyebutkan gejala yang dihadapi Jepang dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat disebut dengan *Secular Stagnation*.<sup>57</sup> Sepanjang tahun 2016 misalnya, Ekonomi Jepang hanya mampu tumbuh di angka 1 persen atau melambat dibanding peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,2 persen. Ekonomi Jepang masih mengandalkan ekspor dan investasi swasta.

Gejala penurunan Industri Jepang yang kalah dengan Cina dikarenakan biaya produksi yang mahal karena standar upah Jepang relatif lebih besar daripada Cina yang masih mampu menyediakan upah murah. Gap upah murah ini menjadi pekerjaan rumah bagi Jepang dalam mendorong kinerja industrinya untuk memacu pertumbuhan ekonomi Jepang setelah apa yang dilakukan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melalui Abenomics yang berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan aturan moneter untuk mendorong inflasi dan merangsang permintaan. Tetapi sektor manufaktur bergerak sangat lambat untuk bisa menanamkan investasi atau meningkatkan upah, dan permintaan konsumen yang mendorong sebagian besar aktivitas bisnis

---

<sup>57</sup> Bill Emmott. Japan puts secular stagnation thesis to the test. Dalam <https://www.ft.com/content/0387d18e-980f-11e4-b4be-00144feabdc0>

tetap tidak terlalu bergairah.<sup>58</sup> Kondisi ini memaksa Jepang terus membuka pasar tenaga kerja dari negara-negara berkembang sehingga Jepang bisa memasok tenaga kerja murah untuk menghidupkan Industrinya.

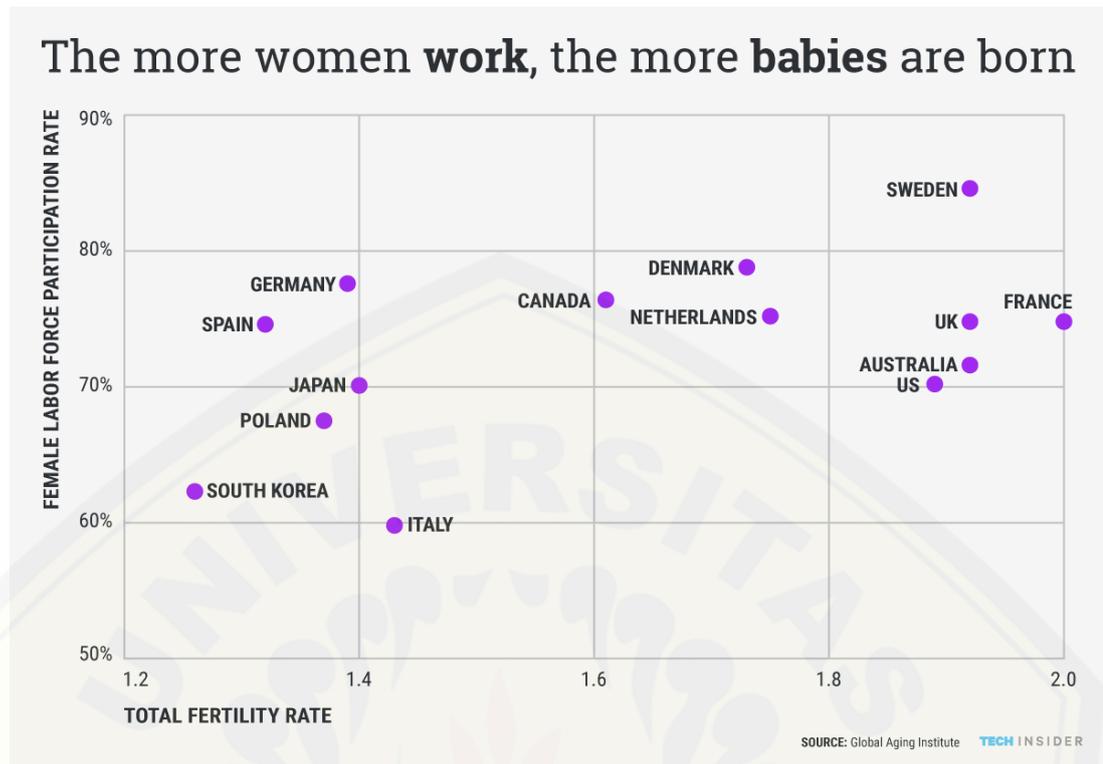
Kompleksitas permasalahan melambatnya kinerja ekonomi dan ketidakmampuan industri Jepang untuk bersaing dengan industri-industri dari negara berkembang yang memiliki biaya produksi lebih murah, Jepang juga mengalami penuaan demografi atau *Aging Society*. Penuaan penduduk Jepang yang tidak lagi didominasi tenaga kerja produktif menjadi permasalahan serius ekonomi Jepang setidaknya dalam memenuhi suplai tenaga kerja lokal dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang memasuki umur tua. Apabila melihat tren pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada medio 1960-an, Industri Jepang masih didominasi demografi yang usia produktif lebih banyak daripada usia tua yang tidak produktif.

Begitu juga dengan tren penurunan ekonomi Jepang yang mulai terjadi pada medio 1980-an, demografi Jepang yang semula berbentuk piramid sudah mulai berubah dan puncaknya di medio tahun 2000-an, demografi Jepang mulai berubah dan didominasi penduduk umur 40 tahun sampai dengan penduduk umur 60 tahun. Tren meningkatnya populasi tua Jepang diprediksi akan terus meningkat membentuk pola seperti layang-layang pada tahun 2055. Masalah demografi Jepang ditandai dengan rendahnya tingkat kelahiran yang terus menerus semenjak masuk medio tahun 2000-an. Rendahnya tingkat kelahiran bayi dihadapkan pada peningkatan harapan hidup yang tinggi akibat kesejahteraan hasil industrialisasi menyebabkan penduduk Jepang makin menua. Penurunan tingkat fertilitas juga menjadi penyebab turunnya jumlah penduduk. Kondisi serupa juga dialami negara-negara industri maju seperti Jerman dan Korea Utara. Dengan tingkat partisipasi perempuan bekerja semakin tinggi tingkat kelahiran bayi.

---

<sup>58</sup> Pertumbuhan Ekonomi Jepang Tumbuh 1% pada 2016. Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pertumbuhan-ekonomi-jepang-tumbuh-1-persen-2016/3720860.html>

Grafik 4. Perbandingan Grafik Fertilitas Negara Maju.

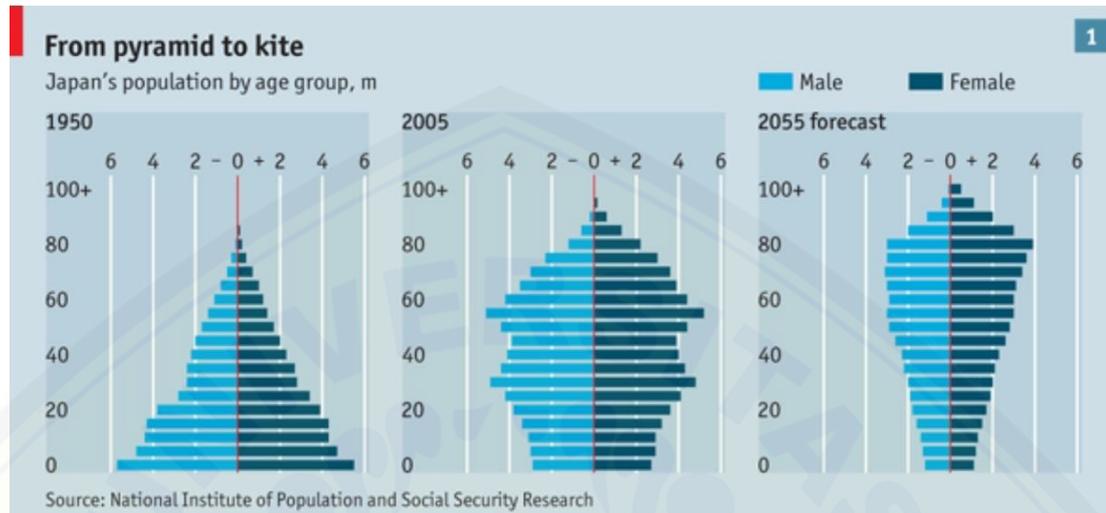


Sumber : Global Aging Institute dalam <https://www.brilio.net/global/jepang-krisis-anak-anak-begini-solusi-dari-pemerintahnya-1602241.html>

Harapan hidup di Jepang pada tahun 2006 misalnya tercatat sebagai harapan hidup yang tertinggi di dunia yaitu mencapai 81,25 tahun dengan situasi demikian populasi Jepang terus menua dimana pada tahun 2004 sekitar 19,5 persen populasi Jepang berada di usia 65 tahun. Selain menyebabkan menurunnya produktivitas, masalah penuaan demografi Jepang menjadi ancaman bagi keberlangsungan industrialisasi Jepang agar bisa bertahan dengan negara-negara industri baru seperti Cina dan Korea maupun negara-negara yang industrialisasinya mulai terus meningkat seperti negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Perubahan struktur demografi Jepang juga menyebabkan sejumlah masalah sosial terutama meningkatnya biaya jaminan sosial seperti dana pensiun. Kondisi ini diprediksi terus memburuk dan dikhawatirkan populasi Jepang akan

merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan mayoritas berada pada usia 50-80 tahun dengan proporsi penduduk usia produktif lebih kecil.<sup>59</sup>

**Tabel 9. Demografi Jepang**



Masalah penuaan demografi yang menjadi ancaman Jepang disatu sisi akan tetapi disisi lain kinerja Jepang dalam menciptakan lapangan pekerjaan cukup mengesankan. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan di Jepang berhasil mencetak prestasi terbaiknya di bulan Februari 2017. Melalui kebijakan Abenomics yang ekspansif berhasil menggairahkan ekonomi dan mampu menaikkan jumlah lapangan kerja yang berhasil membukukan level tertinggi sebagai lapangan kerja tertinggi sejak 20 tahun dan mampu menurunkan angka pengangguran di Jepang.<sup>60</sup> Dengan Rasio jumlah ketersediaan lapangan kerja per pelamar naik menjadi 1,15 di bulan Februari dari 1,14 di bulan Januari, level ini adalah yang tertinggi sejak Maret 1992. Begitu juga dengan jumlah tawaran pekerjaan baru turun 3,5 persen pada Februari dari bulan sebelumnya namun naik 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Kinerja yang positif dalam membuka lapangan

<sup>59</sup> Jepang krisis anak-anak, begini solusi dari pemerintahnya. Dalam <https://www.brilio.net/global/jepang-krisis-anak-anak-begini-solusi-dari-pemerintahnya-1602241.html>

<sup>60</sup> Pasar Tenaga Kerja Jepang Cetak Prestasi Tinggi, Pengangguran Sedikit Menurun. Dalam <http://www.centuryrealtime.com/berita-analisis/komoditi/22-news/vibeconomibusiness/7150-Pasar%20Tenaga%20Kerja%20Jepang%20Cetak%20Prestasi%20Tinggi.%20Pengangguran%20Sedikit%20Menurun>

pekerjaan baru membuat angka pengangguran turun tipis, di bulan Februari turun tipis menjadi 3,5 persen dari 3,6 persen di bulan Januari 2017.<sup>61</sup> Faktor yang menyebabkan membaiknya pasar tenaga kerja selain karena Abenomics juga karena harga konsumen Jepang berhenti turun yang mengakibatkan permintaan tenaga kerja mencapai level tertinggi. Secara keseluruhan data-data ekonomi Jepang menunjukkan perbaikan dan kestabilan ekonomi akan tetapi pertumbuhan ekonomi Jepang masih berkutat pada pertumbuhan yang rendah dan belum bisa mengakhiri gejala *secular stagnation*.

### 3.2 Kerjasama Ketenagakerjaan Indonesia Jepang

Kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Jepang sebagian besar merupakan turunan atau klausul dari kerjasama ekonomi antar kedua negara sehingga sifat dan kekuatan hukum kerjasama ketenagakerjaan hampir sebagian besar bersifat perjanjian yang diatur dalam *memorandum of understanding* atau diatur dalam klausul perjanjian kerjasama bilateral. Setidaknya ada dua bentuk kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang yaitu *pertama* melalui *Government to Government (G to G)* yang diatur dalam perjanjian (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA dengan mengirim tenaga perawat, dan yang *kedua* melalui kerjasama ketenagakerjaan antara Kemenakertrans R.I dengan *The Association for International Manpower Development of Medium and small Enterprises Japan (IMM)* yang bekerjasama terkait program pemagangan ke Jepang. Kerjasama kedua negara memberi keuntungan bagi kedua negara terutama Indonesia yang memiliki angka pengangguran yang relatif besar.

Pelaksanaannya kerjasama ketenagakerjaan Indonesia Jepang melalui program *Government to Government (G to G)*, pemerintah Indonesia sampai tahun 2016 sudah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bidang perawat baik perawat pasien di rumah sakit (*nurse*) dan perawat orangtua usia lanjut (*careworker*) mencapai 1.729 orang dengan proporsi penempatan 593 orang perawat dan 1.199 sedangkan peserta pemagangan yang telah diberangkatkan ke Jepang melalui kerjasama ketenagakerjaan antara Kemenakertrans R.I dengan *The*

---

<sup>61</sup> Ibid

*Association for International Manpower Development of Medium and small Enterprises Japan* (IMM) dari pertama kali program berlangsung pada 1993 sampai pada tahun 2015 mencapai 36.330 orang dengan rincian peserta magang ke Jepang yang telah kembali ke tanah air sebanyak 32.420 orang, dan masih melaksanakan program magang sebanyak 3.860 orang.

### **3.2.1 Kerjasama Ketenagakerjaan Melalui Perjanjian (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA**

Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA). Perjanjian IJ-EPA merupakan perjanjian kerjasama bilateral yang memberikan kesetaraan bagi kedua negara dengan poin-poin penting yang termaktub dalam IJEPA seperti *Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement*.<sup>62</sup>Kerjasama IJ-EPA memiliki fokus dalam skema yang tidak hanya mengatur modalitas penurunan tarif tetapi mengatur juga fasilitas bea masuk untuk barang yang impor langsung dari Jepang untuk empat sektor industri yakni otomotif kendaraan bermotor, elektronik, konstruksi, dan energi.

Kesepakatan IJEPA ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo ABE pada tanggal 20 Agustus 2007. Kepentingan Indonesia menandatangani kerjasama IJEPA karena Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia yang mencapai 20 persen dari total ekspor dan Jepang juga merupakan negara tujuan impor Indonesia yang mencapai 14 persen dari total impor Indonesia. Selain itu Jepang juga merupakan negara terbesar kedua sebagai negara yang paling banyak menanamkan investasi di Indonesia dan juga negara yang paling besar kedua sebagai negara yang memberi pinjaman hutang luar negeri Indonesia.

---

<sup>62</sup>Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership (IJ-EPA). Dalam <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>

IJEPA juga mengatur dan memberikan kemudahan bagi pergerakan tenaga kerja antara kedua negara (*Movement of Natural Persons*). Liberalisasi tenaga kerja kedua negara menjadi penting karena penghapusan hambatan pergerakan tenaga kerja akan memudahkan pergerakan tenaga kerja kedua negara. Salah satu klausul dalam Kerjasama IJEPA terkait dengan ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Jepang memberikan komitmen peningkatan sumber daya manusia. Dengan output ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang juga menjadi salah satu destinasi favorit tujuan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan pengupahan yang paling besar di regional Asia.

Program ketenagakerjaan yang diatur dalam IJEPA salah satu implementasinya adalah program penempatan *Government to Government* (G to G) ke Jepang dengan fokus pada tenaga kerja disektor perawat dan perawat lanjut usia (*careworker*). Tindak lanjut dari kesepakatan IJEPA dikuatkan dengan penandatanganan MoU penempatan perawat dan perawat lanjut usia Indonesia ke Jepang antara BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) atas nama pemerintah Indonesia dengan JICWELS (*Japan International Corporation of Welfare Services*) pada 19 Mei 2008 di Jakarta . Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumlah penempatan TKI perawat dan *careworker* ke Jepang sejak tahun 2008 sampai 2016 adalah 1.792 orang, terdiri 593 orang perawat dan 1.199 untuk perawat lanjut usia.<sup>63</sup> program pengiriman TKI ke Jepang melalui G to G juga terus meningkat tiap tahunnya, dari data tahun 2015 sebesar 279 TKI menjadi 324 TKI pada tahun 2016 dengan proporsi 30 orang akan bekerja sebagai perawat dan selebihnya sebanyak 294 orang sebagai *careworker*.

Pertumbuhan pengiriman tenaga kerja program G to G secara agregat terus meningkat dari kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 terus meningkat meski terjadi fluktuatif pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011 misalnya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Jepang yaitu hanya 105

---

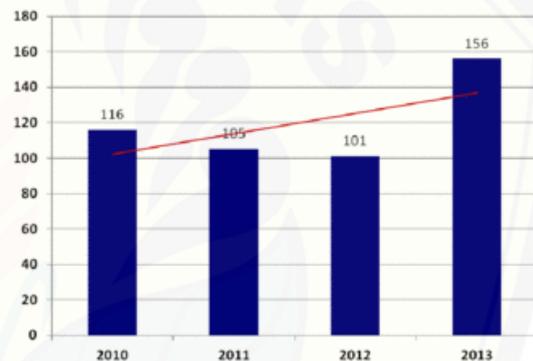
<sup>63</sup> BNP2TKI Berangkatkan 324 TKI Perawat dan Jepang. Dalam <http://www.bnptki.go.id/read/12451/BNP2TKI-Berangkatkan-324-TKI-Perawat-dan-Jepang>

pada 2011 dari sebelumnya pada tahun 2011 sebanyak 116. Tren penurunan terus terjadi pada tahun 2012 yaitu menjadi 101 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 156 tenaga kerja yang dikirim dalam kerjasama G to G. salah satu penyebabnya selain karena faktor persyaratan kemampuan bahasa juga karena penurunan ekonomi Jepang yang mengakibatkan rendahnya permintaan.

**Tabel 10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Program G to G Jepang**

**PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI  
PROGRAM G TO G JEPANG  
TAHUN 2010 s.d 2013**

NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2010	116
2	2011	105
3	2012	101
4	2013	156



Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

13

Didalam MoU itu disebutkan menjelaskan beberapa prasyarat untuk pengiriman TKI perawat dari Indonesia untuk Jepang diantaranya mengikuti proses seleksi administrasi, tes kemampuan perawat, tes psikologi, mengikuti interview, dan Japanese Quiz dan Aptitude Test oleh JICWELS serta dilakukan *medical check up* terhadap kesehatan TKI. Program selanjutnya dilanjutkan dengan pelatihan Bahasa Jepang selama enam bulan di Indonesia dan enam bulan di Jepang. Setelah enam bulan menjalani pelatihan bahasa Jepang

pada Lembaga Pelatihan HIDA (Human Resources and Industry Development Association) Kensu Center Chubu Nagoya, Tokyo dan Osaka.<sup>64</sup>

### **3.2.2 Kerjasama Ketenagakerjaan Antara Kemenakertrans R.I dengan *The Association For International Manpower Development Of Medium And Small Enterprises Japan (IMM)***

Program kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Jepang melalui program pemagangan melalui kerjasama antara Kemenakertrans dengan Jepang IMM Jepang sudah berlangsung sejak tanggal 16 september 1994 diperbaharui melalui amandemen pada tanggal 1 februari 2010 dengan nama *International Manpower Development Organization Japan (IMM)* dan terus berlanjut sampai sekarang. Menurut data Kemenakertrans sejak tahun 1993 dan sampai akhir tahun 2016 pengiriman tenaga kerja pemagangan ke Jepang mencapai 36.330 orang. Sebagian besar peserta magang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK).

Pemagangan dalam sistem ketenagakerjaan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa diperusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pembekalan program dilakukan dengan mekanisme penjaringan awal melalui serangkaian tes yang dilakukan di Indonesia seperti psikotes untuk mengetahui kemampuan pengetahuan dasar dan kepribadian. Selain psikotes juga dilakukan pemeriksaan fisik dan tes fisik untuk mengetahui riwayat kesehatan.

Penjaringan awal juga dilakukan proses interview yang ditujukan untuk mengetahui pengetahuan tentang jepang dan rencana setelah kembali dari proses

---

<sup>64</sup> Penempatan TKI Perawat Program G to G ke Jepang Capai 1.235 Orang. Dalam <http://www.bnptki.go.id/read/9827/Penempatan-TKI-Perawat-Program-G-to-G-ke-Jepang-Capai-1.235-Orang>

pemagangan ke Jepang.<sup>65</sup> Setelah proses penjaringan awal selesai, peserta pemagangan diberi pembekalan yang bertujuan agar tidak mengalami kesulitan selama pelatihan dan keterampilan serta kehidupan sehari-hari setelah masuk ke Jepang seperti pelatihan khusus bahasa Jepang, adat kebiasaan Jepang, dan program pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta, diantaranya mekanik, ahli elektronik, las listrik, bangunan, perkayuan, pabrik makanan, dan sebagainya selama 1 bulan di daerah dan 3 bulan di pusat pelatihan di Indonesia. Setelah peserta pemagangan sudah di Jepang akan diselenggarakan pelatihan kursus selama 4 minggu di Pusat Pelatihan IM Japan, serta menyimpulkan pelatihan sebelumnya di Indonesia.

Pelaksanaan program pemagangan hasil kerjasama kemenakertrans dengan IMM Jepang akan dilaksanakan dengan durasi waktu selama tiga tahun dan terdiri dari dua program yaitu program pemagangan bulan pertama di Jepang disebut masa training atau masa *Kenshusei*. Dalam masa *Kenshusei*, peserta magang akan dilakukan pengujian apabila dinyatakan lulus maka peserta akan mendapatkan ijin (Surat Ijin Tinggal) untuk masuk tahun berikutnya sedangkan pada program pada bulan kedua sampai selesainya masa pemagangan disebut sebagai *technical intern training* atau disebut juga dalam bahasa Jepang sebagai masa *Jisshusei*. Dalam masa *Jisshusei* sudah dianggap sama dengan pemagangan di Jepang menurut UU Ketenagakerjaan di Jepang.<sup>66</sup>

Perubahan UU ketenagakerjaan Jepang juga mempengaruhi peserta pemagangan terutama terkait hak dan kewajiban. Apabila sebelum perubahan UU Ketenagakerjaan, peserta kerja magang dari Indonesia hanya mendapatkan jaminan perlindungan UU ketenagakerjaan Jepang setelah bekerja di tahun kedua dan ketiga sedangkan untuk tahun pertama hanya mendapat perlindungan dari kesepakatan MoU Indonesia dengan Jepang akan tetapi setelah perubahan UU Ketenagakerjaan Jepang pada 2010 peserta magang mendapatkan perlindungan

---

<sup>65</sup> Program Penerimaan Trainee Asing untuk Pelatihan dan Keterampilan. Dalam <http://www.imm.or.jp/in/kensyu.html>

<sup>66</sup> Dasar Pelaksanaan Pemagangan Ke Jepang. Dalam <http://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/page-detail/pemagangan-jepang/3/dasar-pelaksanaan-pemagangan-ke-jepang.html>

ketenagakerjaan secara penuh dari tahun pertama hingga tahun ketiga atau disetarakan dengan tenaga kerja secara umum yang bekerja di Jepang.<sup>67</sup> Kondisi ini selain terpenuhinya hak dan kewajiban peserta magang juga memberikan keuntungan bagi peserta magang karena semakin kuat posisinya ketika berhadapan dengan perusahaan dimana proses pemagangan berlangsung.

Perubahan UU Ketenagakerjaan Jepang dengan penyetaraan yang sama seperti para pekerja Jepang, peserta magang mendapatkan hak dan kewajiban berupa besaran tunjangan upah pada bulan pertama atau masa *Kenshuusei* sebesar ¥ 80.000/bulan sedangkan untuk bulan kedua dan tahun pertama setelah lulus dari pengujian masa *Kenshuusei* peserta magang melanjutkan ke program *Jisshusei* tahun ke satu dan akan menerima gaji sebesar ¥ 90.000/bulan (sekitar Rp 8,2 juta) begitu juga ketika program *Jisshusei* masuk tahun kedua, peserta magang akan menerima gaji sekurang-kurangnya ¥ 90.000/bulan (Rp 9,2 juta) dan akan naik ketika program *Jisshusei* masuk pada tahun ketiga dengan besaran gaji sebesar ¥100.000/bulan (Rp 10,2 juta).<sup>68</sup> Selain itu setelah lulus program pemagangan akan diberikan bantuan permodalan bagi setiap peserta.

IMM Jepang sebagai pengelola program pemagangan memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan kecil dan menengah dengan spesialisasi di bidang permesinan, pekerjaan logam, konstruksi, tekstil, percetakan serta industri manufaktur lainnya seperti pengalengan, plastik. Setiap perusahaan kecil menengah Jepang yang bekerjasama dengan IMM akan menampung peserta magang dengan proporsi sebagai berikut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Tenaga Kerja Magang RI ke Jepang Dapat Perlindungan Penuh. Dalam <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1290113/tenaga-kerja-magang-ri-ke-jepang-dapat-perlindungan-penuh>

<sup>68</sup>Kemenaker Targetkan Kirim 2.000 Tenaga Kerja Magang ke Jepang. Dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/04/191234026/Kemenaker.Targetkan.Kirim.2.000.Tenaga.Kerja.Magang.ke.Jepang>

<sup>69</sup> Op.Cit. Program Penerimaan Trainee Asing untuk Pelatihan dan Keterampilan.

**Tabel 11. Proporsi Program Magang dalam Satu Perusahaan**

<b>Jumlah pegawai tetap (terkecuali tenaga lepas)</b>	1-50 orang	51-100 orang	101-200 orang	201-300 orang	Lebih dari 301 orang
<b>Jumlah trainee yang dapat ditampung</b>	1-3 orang	3-6 orang	6-10 orang	10-15 orang	1-20 dari jumlah pegawai

Sumber : <http://www.imm.or.jp/in/kensyu.html>

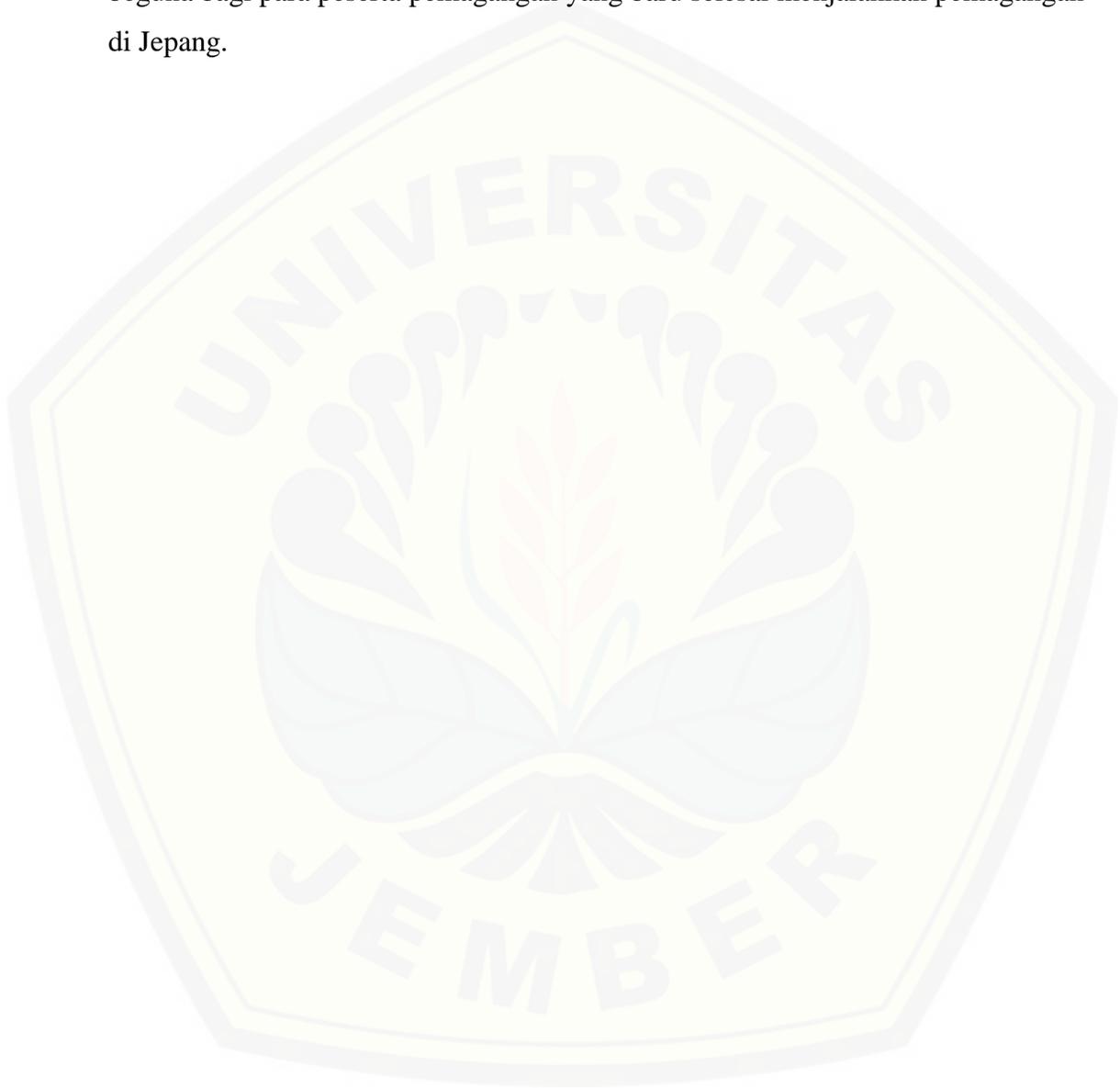
Catatan: Perusahaan yang memiliki kurang dari 2 pegawai, tidak dapat menampung trainee lebih dari jumlah pegawai tetap yang ada pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2016 misalnya Kemenakertrans mengirim 178 peserta magang angkatan 278 ke Jepang dalam program IMM Jepang yang akan mengikuti program magang di 45 perusahaan kecil dan menengah Jepang yang bergerak di berbagai bidang kejuruan seperti industri manufaktur dan konstruksi. Menurut rilis Kemenakertrans banyak dari peserta magang telah berhasil meneruskan untuk bekerja di perusahaan besar baik di Jepang maupun perusahaan besar di Indonesia. Selain itu sesuai dengan tujuan pemagangan ke Jepang yang di fokuskan untuk pengembangan para peserta agar ketika pulang ke Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai untuk kebutuhan industri dan diharapkan mampu mendirikan industri di Indonesia, banyak dari alumni peserta pemagangan yang telah berhasil menjadi pengusaha dan mempekerjakan cukup banyak karyawan dengan mengadopsi perusahaan-perusahaan dimana peserta magang bekerja.

Diantaranya alumni yang sukses mendirikan pabrik adalah M. Ridwan, pemilik pabrik bata tahan api di Surabaya, Jawa Timur. Pabrik bata M. Ridwan sekarang memiliki omset yang cukup besar menyentuh angka Rp 4 miliar per-bulan dengan mempekerjakan 1500 karyawan. Selain M. Ridwan ada Teguh Wibowo asal Sukoharjo, Jawa Tengah dan Hadi Mulyono asal Surabaya. Teguh merintis usaha pabrik garmen yang cukup besar dengan mempekerjakan sekitar 500 orang dan juga mendirikan sekolah kejuruan berbeda dengan Teguh, Hadi bergerak dibidang yang memerlukan teknologi tinggi yaitu rekayasa mesin. Perusahaan yang didirikan Hadi mampu merekrut 20 karyawan.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Kemnaker Lepas 178 Peserta Magang ke Jepang. Dalam <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kemnaker-lepas-178-peserta-magang-ke-jepang>

Program pemagangan Jepang tidak hanya mendapatkan keterampilan dari magang di perusahaan kecil menengah Jepang tetapi juga memiliki jejaring yang cukup kuat. Pada 2016 misalnya perkumpulan para program pemagangan Jepang berhasil mendirikan Koperasi Alumni Pemagangan Jepang yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan alumni pemagangan Jepang dapat berguna bagi para peserta pemagangan yang baru selesai menjalankan pemagangan di Jepang.



## BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan program pemagangan kerjasama IMM Jepang dengan Kemenakertrans maka masalah pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja dapat diselesaikan dengan program magang di Jepang yang memberikan upah lebih besar daripada bekerja di Indonesia juga adanya transfer pengetahuan yang meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia, serta Indonesia juga mendapatkan remitensi yang relatif besar dari transfer yang dilakukan para peserta magang Jepang. Disisi lain Jepang juga mendapatkan suplai tenaga kerja murah dan usia produktif dari Indonesia untuk menghidupi perusahaan kecil menengah Jepang yang tidak lagi dapat bersaing dengan negara-negara industri seperti Korea Selatan dan Cina yang menggunakan upah murah untuk produksi industrinya. Penguatan hubungan bilateral Jepang dengan Indonesia akan menghasilkan efek berganda kerana Jepang merupakan negara terbesar kedua yang berinvestasi di Indonesia serta negara terbesar yang memberikan pinjaman bagi Indonesia untuk pembangunan serta bagi Jepang, hubungan baik dengan Indonesia akan memberikan keuntungan tidak hanya dalam aspek ekonomi seperti pengerjaan proyek strategis nasional akan tetapi juga sebagai mitra dalam geopolitik di Asia Pasifik.

Terdapat tiga hal utama dari adanya amandemen pada MoU kerjasama ketenagakerjaan antara IMM dengan Kemenakertrans yang pertama, paska keputusan amandemen MoU kerjasama pemagangan dengan IMM Jepang jumlah peserta pemagangan terus meningkat signifikan dan akan terus mengalami tren positif kedepannya, serta yang kedua amandemen MoU yang mengikuti perubahan UU ketenagakerjaan Jepang dengan penyetaraan status yang sama dengan pekerja Jepang memberikan nilai lebih bagi peserta magang baik dari upah yang layak daripada sebelum amandemen dan adanya perlindungan penuh berdasarkan UU ketenagakerjaan Jepang dari yang sebelumnya hanya berdasarkan MoU antara Jepang dan Indonesia, serta semakin meningkatnya kapasitas tenaga kerja hasil pemagangan yang berakibat positif pada dunia kerja di Indonesia

dimana banyak tercipta lapangan kerja yang diciptakan oleh mantan pemegang-pemegang di Jepang. Secara garis besar baik Jepang maupun Indonesia mengamandemen MoU kerjasama ketenagakerjaan antara IMM dengan Kemenakertrans mengikuti prinsip positif sum game dalam ekonomi politik internasional dimana kedua belah pihak mendapat keuntungan dari adanya kerjasama.



DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Basri, Faisal dan Gatot Arya Putra. *Escaping the middle income trap in Indonesia An analysis of risks, remedies and national characteristics*. Jakarta. Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office.
- Damanhuri, Didin. 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI.
- Kano, Hideki Thurgood dan James M Minamoto. 2008. *Labor and Employment Law in Japan*. dalam Philip M Berkowitz dan Thomas Muller Bonnani. International law and Employment Law. ABA Publishing.
- Keohane, Robert and Joseph S. Nye. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston. Little, Brown & Co.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni. Bandung. hlm. 84
- Molo, Marcelinus. 1997. *Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Ravenhill, John. 2008. *Global Political Economy. Fifth Edition Oxford Press*. Hal 21.
- Saptorini, I dan Jafar Suryomenggolo. 2005. *Kekuatan Sosial Serikat Buruh: Putaran Baru dalam Perjuangan Menolak Outsourcing*. Jakarta: Trade Union Right.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta.
- Suriasumantri, Jujun. 2005. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. hal. 48
- Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Andi Offset. Hal 4.

**Jurnal dan Dokumen :**

Basri, Faisal dan Gatot Arya Putra. *Escaping the middle income trap in Indonesia An analysis of risks, remedies and national characteristics*. Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office. Jalan Kemang Selatan II No. 2 A | Jakarta 12730. Indonesia. Diakses dari <http://www.fes.de/cgi-bin/gbv.cgi?id=12509&ty=pdf>

Powell, Robert. 1991. *Absolute and Relative Gains in International Relations Theory*. *The American Political Science Review*, Vol. 85, No. 4, pp. 1303-1320. American Political Science Association.

Ohashi, Isao. 2011. *The Minimum Wage System in Japan: In Light of Circumstances in the United States and Europe*, Vol. 8, no. 2 Spring. Japan Labor Review.

*Treaty Of Amity And Commerce Between Japan And The Republic Of Indonesia And Exchange Of Notes*. American Society Of International Law *International Legal Materials*. Vol. 2, No. 4 (July 1963), Pp. 706-726. Diakses dari [https://www.jstor.org/stable/20689659?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/20689659?seq=1#page_scan_tab_contents), pada 26 Mei 2017

**Artikel Online :**

Anonym. *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership (IJ-EPA)*. Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2017.

Antaraneews.com. *BKKBN: Indonesia Mendapat Bonus Demografi pada 2020*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/print/145637/bkkbn->

indonesia-mendapat-bonus-demografi-pada-2020, pada tanggal 20 Mei 2017.

Asiati, Devi. 2013. *Sistem Outsourcing: Peluang dan Tantangan Permasalahan Ketenagakerjaan*. Diakses dari

<http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/ketenagakerjaan/69-sistem-outsourcing-peluang-dan-tantangan-permasalahan-ketenagakerjaan>, pada tanggal 5 Mei 2017.

BI dan BNP2TKI. *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan*. Diakses dari [www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf), pada tanggal 6 Mei 2017.

BKPM. 2017. *Realisasi Penanaman Modal Pmdn – Pma Triwulan IV Dan Januari – Desember Tahun 2016*. Diakses dari [http://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi\\_indonesia/file/Bahan\\_Paparan\\_TW\\_IV\\_2016.pdf](http://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf), pada tanggal 11 Mei 2017.

BNP2TKI. 2017. *BNP2TKI Berangkatkan 324 TKI Perawat dan Jepang*. Diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id/read/12451/BNP2TKI-Berangkatkan-324-TKI-Perawat-dan-Jepang>, pada tanggal 15 Juni 2017.

BNP2TKI. 2015. *Penempatan TKI Perawat Program G to G ke Jepang Capai 1.235 Orang*. Diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id/read/9827/Penempatan-TKI-Perawat-Program-G-to-G-ke-Jepang-Capai-1.235-Orang>, pada tanggal 26 Mei 2017.

Century Investment Futures. *Pasar Tenaga Kerja Jepang Cetak Prestasi Tinggi, Pengangguran Sedikit Menurun*. Diakses dari

<http://www.centuryrealtime.com/berita-analisis/komoditi/22-news/vibeconomibusiness/7150-Pasar%20Tenaga%20Kerja%20Jepang%20Cetak%20Prestasi%20Tinggi,%20Pengangguran%20Sedikit%20Menurun>, pada tanggal 23 Mei 2017.

- Damar, Agustinus R. 2016. *Foxconn Resmi Akuisisi Sharp Senilai Rp 46 Triliun*. Diakses dari <http://tekno.liputan6.com/read/2471819/foxconn-resmi-akuisisi-sharp-senilai-rp-46-triliun>, pada tanggal 29 Mei 2017.
- Databoks. 2016. *Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-3 di Asia Tenggara*. Diakses dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/pengangguran-indonesia-tertinggi-3-di-asean>, pada tanggal 20 Mei 2017.
- Databoks. 2017. *Berapa Nilai Investasi Jepang di Indonesia?*. Diakses dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/13/berapa-nilai-investasi-jepang-di-indonesia>, pada tanggal 28 Mei 2017.
- Detik Finance. 2010. *Tenaga Kerja Magang RI ke Jepang Dapat Perlindungan Penuh*. Diakses dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1290113/tenaga-kerja-magang-ri-ke-jepang-dapat-perlindungan-penuh>, pada tanggal 3 Mei 2017.
- Detik Finance. 2009. *Angka Pengangguran 2010 Capai 10%*. Diakses dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1175915/angka-pengangguran-2010-capai-10>, pada 25 April 2017.
- Disnakertrans Banten. *Dasar Pelaksanaan Pemagangan Ke Jepang*. Diakses dari <http://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/page-detail/pemagangan-jepang/3/dasar-pelaksanaan-pemagangan-ke-jepang.html>, pada tanggal 11 Mei 2017.
- Embassy of Japan. 2007. *Hubungan Perekonomian Indonesia – Jepang*. Diakses dari [http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html), pada 23 April 2017.
- Emmott, Bill. *Japan puts secular stagnation thesis to the test*. Diakses dari <https://www.ft.com/content/0387d18e-980f-11e4-b4be-00144feabdc0>, pada tanggal 25 Mei 2017.
- Fauzi, Yuliyanna. 2017. *2018, Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Naik 5,3 Persen*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170615165201-78->

222016/2018-bank-dunia-prediksi-ekonomi-indonesia-naik-53-persen/, pada tanggal 17 Juni 2017.

Gajimu.com. *Pendidikan Mempengaruhi Kualifikasi Tenaga Kerja*. Diakses dari <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/pendidikan-mempengaruhi-kualifikasi-tenaga-kerja>, pada tanggal 22 Mei 2017.

Gareta, Sella Panduarsa. 2017. *Indonesia-Jepang tingkatkan kerjasama pendidikan vokasi*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/607077/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-sama-pendidikan-vokasi>, pada tanggal 22 Mei 2017.

Hart, Oliver and Bengt Holmstrom. 2016. *The Prize in Economic Sciences 2016*. Diakses dari [https://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html](https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html), pada tanggal 4 Mei 2017.

IMM Japan. *Program Penerimaan Trainee Asing untuk Pelatihan dan Keterampilan*. Diakses dari <http://www.imm.or.jp/in/kensyu.html>, pada tanggal 24 Mei 2017.

Iryanti, Rahma. 2014. *Arah Kebijakan Ketenagakerjaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Diakses dari <https://www.slideshare.net/RestlessDita/04-des-2014rorenakerindeksketenagakerjaanv2>, pada tanggal 26 Mei 2017.

Japan Foundation Jakarta. *Tentang The Japan Foundation*. Diakses dari <http://www.jpf.or.id/id/>, pada tanggal 25 Mei 2017.

Japan ODA Indonesia. 2016. *Realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Skema. Bantuan Hibah NGO Jepang*. Diakses dari [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_ngo.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_ngo.htm), pada tanggal 21 Mei 2017.

Jatmiko, Bambang P. 2015. *Kemenaker Targetkan Kirim 2.000 Tenaga Kerja Magang ke Jepang*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/04/191234026/Kemenaker.Targetkan.Kirim.2.000.Tenaga.Kerja.Magang.ke.Jepang>, pada tanggal 6 Mei 2017.

- Jauhari, Andi. 2017. *Indonesia terima dana bantuan konservasi sejuta yen Jepang*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/612078/indonesia-terima-dana-bantuan-konservasi-sejuta-yen-jepang>, pada tanggal 25 Mei 2017.
- Kantor Staf Presiden. "Pertemuan Dengan Shinzo Abe Di Istana Bogor, Indonesia Dan Jepang Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Yang Sangat Produktif". Diakses dari <http://Ksp.Go.Id/Pertemuan-Dengan-Shinzo-Abe-Di-Istana-Bogor-Indonesia-Dan-Jepang-Hasilkan-Sejumlah-Kesepakatan-Yang-Sangat-Produktif/>, pada tanggal 24 Mei 2017.
- Kedubes Jepang. *Beasiswa Pemerintah Jepang (MONBUKAGAKUSHO)*. Diakses dari <http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html>, pada tanggal 21 Mei 2017.
- Kedubes Jepang. *Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*. Diakses dari [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html), pada tanggal 1 Mei 2017.
- Kedubes Jepang. *Kunjungan Para Tamu Negara*. Diakses dari [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html), pada tanggal 11 Mei 2017.
- Kedubes RI. 2015. *Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*. Diakses dari <http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx>, pada 26 Mei 2017.
- Kemenakertrans. *Kisah Sukses*. Diakses dari [http://www.pemagangan.com/new/0menu\\_public/kisahsukses/kisahsukses.php](http://www.pemagangan.com/new/0menu_public/kisahsukses/kisahsukses.php), pada 2 Juli 2017.
- Kemenperin. 2007. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Its Effects on Indonesian and Japanese Economy*. Tokyo. Diakses dari <https://www.indonesia-investments.com/upload/documents/Indonesia-Japan-Economic-Partnership-Agreement-IJEPA-Indonesia-Investments.pdf>, pada tanggal 27 Mei 2017.

- Kemenperin. "Jepang Investor Nomor Satu". Diakses dari <http://kemenperin.go.id/artikel/6113/jepang-Investor-Nomor-Satu>, pada 16 April 2017.
- Kompas. 2010. "Amandemen MoU Progam Pemagangan ke Jepang Disahkan". Diakses dari <http://gakama.co.id/index.php/public/information/news-detail/23>, pada 18 April 2017.
- Kompas. 2010. "Amandemen MoU Progam Pemagangan ke Jepang Disahkan". Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/01/12115352/Amandemen.MoU.Program.Pemagangan.ke.Jepang.Disahkan>, pada tanggal 17 April 2017.
- Kuwado, Fabian J. 2017. *Jokowi Harap Investasi Jepang Tularkan Disiplin ke SDM Indonesia*. Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2017/04/25/12324411/jokowi.harap.investasi.jepang.tularkan.disiplin.ke.sdm.indonesia>, pada tanggal 23 Mei 2017.
- Kuwado, Fabian Januarius. 2017. *Resmikan Pabrik Mitsubishi, Jokowi Tegaskan Investasi Tak Boleh Dipersulit*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/11324241/resmikan.pabrik.mitsubishi.jokowi.tegaskan.investasi.tak.boleh.dipersulit>, pada tanggal 5 Mei 2017.
- Menaker. 2016. *Kemnaker Lepas 178 Peserta Magang ke Jepang*. Diakses dari <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kemnaker-lepas-178-peserta-magang-ke-jepang>, pada tanggal 10 Mei 2017.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Development Cooperation in the Field of Climate Change*. Diakses dari [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/environment/pdfs/cool\\_earth\\_pe.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/environment/pdfs/cool_earth_pe.pdf), pada tanggal 24 Mei 2017.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Financial Mechanism for "Cool Earth Partnership"*. Diakses dari

- <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/wef/2008/mechanism.html>, pada tanggal 13 Mei 2017.
- Putra, M. Firman E. 2017. *Pemerintah Ingin Tinjau Ulang Kerja Sama Indonesia – Jepang*. Diakses dari <http://katadata.co.id/berita/2017/03/07/pemerintah-ingin-tinjau-ulang-kerja-sama-indonesia-jepang>, pada tanggal 22 Mei 2017.
- Rhee, Changyong. 2012. *Indonesia risks falling into the middle-income trap*. Diakses dari <https://www.adb.org/news/op-ed/indonesia-risks-falling-middle-income-trap-changyong-rhee>, pada tanggal 21 Mei 2017.
- Suryanto. 2012. *Menakertrans harap kerja sama dengan Jepang ditingkatkan*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/330938/menakertrans-harap-kerja-sama-dengan-jepang-ditingkatkan>, pada tanggal 8 Mei 2017.
- Syahrul, Yura. 2017. *S&P Akhirnya Kerek Peringkat Utang Indonesia Jadi Layak Investasi*. Diakses dari <http://katadata.co.id/berita/2017/05/19/sp-akhirnya-kerek-peringkat-utang-indonesia-jadi-layak-investasi>, pada tanggal 29 Mei 2017.
- Trading Economics. *Data upah minimum Jepang*. Diakses dari <https://tradingeconomics.com/japan/minimum-wages>, pada tanggal 3 Mei 2017.
- VOA. 2017. *Pertumbuhan Ekonomi Jepang Tumbuh 1% pada 2016*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pertumbuhan-ekonomi-jepang-tumbuh-1-persen-2016/3720860.html>, pada tanggal 26 Mei 2017.
- Wihardja, Maria Monica. *The Effect of the Commodity Boom on Indonesia's Macroeconomic Fundamentals and Industrial Development*. Diakses dari <https://iorj.hse.ru/data/2016/11/15/1110407997/M.M.%20Wihardja.pdf>, pada tanggal 23 Mei 2017.
- Zufar, Muhammad. 2016. *Jepang krisis anak-anak, begini solusi dari pemerintahnya*. Diakses dari <https://www.brilio.net/global/jepang-krisis-anak-anak-begini-solusi-dari-pemerintahnya-160224l.html>, pada tanggal 20 Mei 2017.